

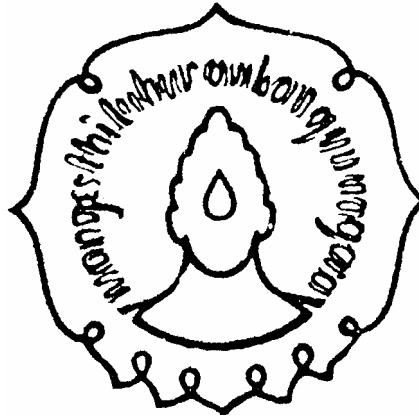
**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PADA
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KECAMATAN WONOSALAM, KABUPATEN DEMAK,
JAWA TENGAH**

TESIS

Untuk memenuhi sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Penyuluhan Pembangunan

Minat Utama : Manajemen Pengembangan Masyarakat



Oleh :

Tini

S6304038

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PADA
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KECAMATAN WONOSALAM, KABUPATEN DEMAK**

Disusun oleh :

Tini
S 6304038

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Ir. Suprpti Supardi, MP NIP. 130 604 188
Pembimbing II	Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, MS NIP. 131 477 171

Mangetahui
Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS
NIP. 130 935 732

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PADA
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KECAMATAN WONOSALAM, KABUPATEN DEMAK**

Disusun oleh :

Tini
S 6304038

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Ir. Kusnandar
Sekretaris	Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si
Anggota Penguji	1. Dr. Ir. Suprpti Supardi, MP
	2. Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, MS

Mangetahui

Ketua Program	Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS NIP. 130 935 732
Direktur Program	Prof. Drs. Suranto, M.Sc Ph. D NIP. 131 472 192

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Suamiku tercinta Edy Achmad Asiq

Dan kedua putraku Alan dan Isa

2. Bpk dan Ibu Harjo Sumarto

3. Bpk H. Nurhadi dan Ibu Hj. Syarifah Nur

(Alm)

4. Kakak – kakakku Tercinta

MOTTO

“ Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya

kepadamu lalu (hati) kamu menjadi puas”

(Alqur'an, surat Adh Dhuhha : 3-5)

“ Permulaan yang penuh dengan kesulitan-kesulitan pada akhirnya akan diperoleh kemenangan dan keberhasilan”

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK” dengan baik dan lancar.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas pendidikan pasca sarjana pada Progam Studi Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut berperan dan partisipasi dalam peyelesaian tesis ini,dengan memberikan bantuan, dorongan, semangat, saran, bimbingan dan sebagainya, Ucapan terima kasih penulis sampaikan, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Totok Madikanto, MS selaku Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan dan pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan tesis ini.
2. Dr.Ir.Suprpti Supardi, MP selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan dorongan, saran dan bimbingan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

3. Dr.Ir.Tubagus Hasanudin, MS selaku pembimbing II yang telah membirikan arahan -arahan dan bimbingan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Ir. Sunandar selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan saran dan bimbingan sehingga penulisan ini dapat selesai dengan lancar.
5. Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan saran dan bimbingan sehingga penulisan ini dapat selesai dengan lancar.
6. Camat Wonosalam Demak beserta Staf yang telah memberikan ijin dan bantuan selama penulis mengadakan penelitian.
7. Suami tersayang Edy Achmad Asiq, SH yang selalu memberi motivasi, bantuan moril, materil, doa dan selalu setia menghantar jemput sampai terselesainya tesis ini.
8. Kedua orang tua bapak dan ibu Harjo Sumarto yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis dengan segala kasih sayang dan pengorbanannya serta dengan tulus ikhlas selalu mendoakan dan memberi restu untuk kemajuan putra-putrinya. Bapak mertua H. Nurhadi yang telah tulus ikhlas mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
9. Bapak Mulyono Abdul Hamid, BA selaku Penanggung jawab Kegiatan (PjOK) PPK di Kecamatan Wonosalam yang telah membantu dengan tulus ikhlas mencarikan data untuk penulis.

10. Teman - teman UPK Kecamatan Wonosalam yang selalu membantu penulis dengan tulus ikhlas mencari data di lapangan.semoga kebaikannya dapat pahala dari Allah SWT Amin.
11. Teman – teman PNPM-MD Kecamatan Kedung yang telah tulus membantu dan memberi semangat sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.
12. Teman-teman PNPM-MD Kabupaten Jepara yang telah tulus membantu dan memberi semangat sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.
13. Seluruh Dosen dan staf pengajar dipasca sarjana program studi penyuluhan pembangunan UNS yang tidak bisa sebut satu persatu.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan tesis ini masih jauh,namun penulis berharap tesis ini bisa bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan almamater.

Surakarta, 14 Nopember 2008

Penulis

PERNYATAAN

NAMA : TINI
NIM : S60304038

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN WONOSASALAM, KABUPATEN DEMAK adalah betul – betul karya sendiri, Hal - hal yang bukan karya saya dalam tesis diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka ,serta apabila ada kesalahan cetak akan dibetulkan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini dibuat dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 17 Nopember 2008

Yang membuat

Tini

ABSTRAK

Tini , S 60304038, 2008, Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pada Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Tesis Program Penyuluhan Pembangunan , Minat Utama Manajemen Pengembangan Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing (1) Dr. Ir. Suprpti Supardi, MP, Pembimbing (2) Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, MS.

Tujuan dari Penelitian ini untuk menjelaskan dan menggambarkan proses partisipasi perempuan pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK), mulai dari perencanaan , pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pelestarian dan tidak lepas dari proses pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat menemukan keuntungan dari partisipasi dalam kegiatan UEP pada PPK.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan arsip dan dokumen, kegiatan aktifitas informan (nara Sumber), tempat atau lokasi dan kegiatan UEP , alat dan media yang dipakai dalam proses partisipasi perempuan. Sumber pendukung adalah Ketua kelompok, anggota peminjam dan tokoh masyarakat perempuan dan data yang digunakan menggunakan data dari laporan Unit Pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Wonosalam. Penelitian dilakukan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak . Kegiatan analisis data dilakukan dengan memberi interpretasi berulang-ulang terhadap berbagai peristiwa dan fenomena yang berkembang sampai ditemukannya data yang akurat.

Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling. Strategi dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif yaitu dengan wawancara mendalam (*in dept interview*), observasi langsung dan non interaktif yaitu dengan kuesioner, mencatat dokumen (*content analysis*). Analisis data menggunakan teknik analisis kasus tunggal dan tiap unit menggunakan model analisis interaktif. Hasil dari data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data dapat disimpulkan : Pertama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelestarian dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat diberi wewenang untuk menentukan kegiatan yang benar-benar merupakan kebutuhan, dilaksanakan sendiri, dimonitoring dan dilestarikan sendiri oleh masyarakat, Kedua Partisipasi masyarakat khususnya perempuan pada tahap perencanaan lebih besar dari pada partisipasi laki-laki, Ketiga Kegiatan UEP yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan pengembaliannya / pelestariannya lebih baik dari kelompok laki-laki.

Dari hasil analisis diperoleh adanya kesimpulan bahwa kegiatan UEP yang diusulkan dari kelompok perempuan membawa hasil yang sangat baik terhadap kelompok perempuan dan masyarakat perempuan pada umumnya, teknik pendekatan yang dilakukan pada PPK adalah pendekatan pemberdayaan yang merupakan substansi penanggulangan kemiskinan yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses kegiatan.

Hasil temuan rumusan penelitian adalah keberhasilan PPK dalam pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan diberikannya kebebasan dan wewenang untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan PPK. Berdasarkan temuan-temuan peneliti menyarankan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP antara lain :

1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berjenjang kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman agar dalam kegiatan PPK khususnya UEP dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar pengelolaan dana UEP yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (PPK) yang sudah dilakukan secara transparan dapat berjalan baik.
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan administrasi, kelembagaan kelompok secara terus menerus sehingga kegiatan UEP dapat berjalan terus.
4. Membantu masyarakat dan kelompok dalam memecahkan masalah yang dihadapi khususnya tentang pelestarian UEP agar dapat meminimalkan tunggakan.
5. Tim Pelestari Desa yang sudah berjalan baik diharapkan tetap berfungsi secara optimal agar kegiatan yang sudah berjalan baik dapat berkesinambungan.
6. Dalam melakukan kebijakan dan memutuskan kebijakan diupayakan menggunakan model pendekatan yang lebih partisipatif dan *bottom up* dengan melibatkan masyarakat.
7. Peran perempuan perlu dipertimbangkan dalam keterlibatan pembangunan.

ABSTRACT

Tini, S.TP 6004038, 2008 Woman Participation In productive economic Business activity (UEP) at district development program in Wonosalam District Demak Sub-Province. Thesis of Development Counselling Program, Special Enthusiasm of Management Development of Society Pasca Master Sebelas Maret University Surakarta. Counsellor (1) Dr. Ir. Suprapti Supardi, MP, Counsellor (2) Dr. Ir. Tubagus Hasanudin, MS.

The purposes of this research to explain and depict woman participation process at District Development Program (PPK), start from planning, execution, operation, exploiting and continuation and not get out of process enableness of society so that society find advantage of participation in activity of UEP at PPK.

This research conducted with qualitative approach with type research of case study. Data collecting conducted with document and archives, activity of informant aktifitas (resource), location or place and activity of UEP, media and appliance weared in course of woman participation. Source of supporter that is Chief Group, lender member and woman elite figure and used data use data report Activity Organizer Unit (UPK) Wonosalam District. Research conducted in Wonosalam District Demak Sub-Province. Data analysis activity conducted with giving interpretation repeatedly to various phenomenon and event expanding finding of data which accurate. Informant repaired with purposive sampling technique. Strategy in research with data collecting technique having the character interactive that is with in dept interview, direct observation and non interactive that is with questionnaire, content analysis. Data analysis use technique analyze single case and every unit use interactive analyze model.

From result of data analyzed by reduction data, data presentation and withdrawal conclusion. Result of data analysis can be concluded: First District Development Program (PPK) represent program which start from planning, execution, monitoring, evaluation and continuation of executed by society alone, society given by authority to determine really representing activity of society requirement, executed by society, monitoring by society and preserve by society, Both Society Participation specially woman at planning phase bigger than men participation, third UEP activity which executed by woman group its return / continuation is better than men group.

From analysis result obtained by the existence of conclusion that activity of proposed UEP of woman group bring very well result by woman group and woman society in general, approach technique which conducted by PPK is approach of enableness representing resolving substation of poorness that is existence of increasing society capacities in accessing activity.

Result of research formula finding is efficacy of PPK in solving poorness very influenced by society participation and giving authority and freedom to share each PPK activity. According to researcher findings suggest to increase woman participation in UEP activity for example :

1. Conducting socialization continually and have ladder to society to increase understanding of expectation of PPK activity specially UEP can be useful as according to requirement of local society
2. Giving facilitation to society so that fund management of UEP managed by Unit Organizer of Activity (PPK) which have been conducted transparently can work well
3. Conducting adjacent and construction of administration, institute of group continually so that activity of UEP can move along.
4. Assisting group and society specially in solving problem which faced specially about continuation of UEP so that can minimize arrears
5. Team Maintainer of Countryside which have worked well to be expected remain to function in an optimal fashion so that activity which have worked well to earn continually
6. In conducting policy and decide policy strived to use more partisipative approach model and up bottom by entangling society
7. Need to consider about women role in development involvement

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR MOTTO.....	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	
1. Pemberdayaan Masyarakat	12
2. Gender	14
3. Perempuan dan Pembangunan.....	15
4. Persepsi Masyarakat.....	18
5. Partisipasi	21
6. Program Pengembangan Kecamatan	27
7. Usaha Ekonomi Produktif	34
B. Kerangka Berpikir	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Penentuan Lokasi	41
B. Bentuk Strategi Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Sampling	45
F. Validasi Data	46
G. Teknik Analisis Data.....	48

H. Prosedur Penelitian	49
------------------------------	----

BAB IV SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Sajian Data	
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
2. Potensi Sosial , Budaya dan Ekonomi	55
2.1. Sosial dan Budaya	55
2.2. Ekonomi	56
3. Presepsi Masyarakat Terhadap PPK	59
4. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan	61
4.1. Program Pengembangan Kecamatan	61
4.2. Pelaksanaan PPK di Kecamatan Wonosalam	63
5. Partisipasi masyarakat	67
5.1. Lingkup Partisipasi	67
5.2. Bentuk – Bentuk Partisipasi	70
5.3. Tingkat Partisipasi	89
B. Pembahasan	
1. Temuan Penelitian	110
2. Hasil Penelitian	120

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan	127
B. Implikasi	129
C. Rekomendasi	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 1997 – 2006	3
2. Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Demak, Tahun 2002 – 2005	4
3. Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Wonosalam, tahun 2002-2007	5
4. Jumlah Kelompok, Anggota Pemanfaat UEP dan SPP Kecamatan Wonosalam, Tahun 2003 – 2005	8
5. Jenis Usaha Pemanfaat SPP dan UEP, Tahun 2008	37
6. Jumlah Penduduk menurut usia dan Jenis Kelamin di Kecamatan Wonosalam Tahun 2008	54
i. Penduduk menurut Pendidikan yang ditamatkan di Kecamatan Wonosalam Tahun 2008	57
ii. Penduduk menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Wonosalam Tahun 2008	58
9. Jumlah Pendanaan PPK	62
10. Distribusi Kehadiran Perempuan pada Program sebelum PPK	76
11. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada kegiatan PPK di Kecamatan Wonosalam Tahun 2003 – 2005	84
12. Hasil Usulan PPK di Kecamatan Wonosalam Tahun 2003 – 2005	90

13.	Distribusi Frekuensi Partisipasi Perempuan pada Kegiatan UEP Pada PPK di Kecamatan Wonosalam	93
14.	Data jumlah kelompok di Kecamatan Wonosalam	98
15.	Distribusi Frekuensi pengaruh Partisipasi Perempuan pada Kegiatan UEP Pada PPK yang berkaitan dengan umur	102
16..	Distribusi Frekuensi pengaruh Partisipasi Perempuan pada Kegiatan UEP Pada PPK yang berkaitan dengan Pendidikan	104
17.	Distribusi Frekuensi pengaruh Partisipasi Perempuan pada Kegiatan UEP Pada PPK yang berkaitan dengan Pekerjaan	106
18.	Distribusi Frekuensi pengaruh Partisipasi Perempuan pada Kegiatan UEP Pada PPK yang berkaitan dengan Tanggungan keluarga	108
19.	Data Tunggalan UEP di UPK PPK Kecamatan Wonosalam Bulan Mei 2008	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1.	Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan UEP pada PPK	39
2.	Proses Analisis Interaktif	49

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKAD	: Badan Kerja Sama Antar Desa
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
DOUM	: Dari Oleh Untuk Masyarakat
FD	: Fasilitator Desa

FK	: Fasilitator Kecamatan
IDT	: Inpres Desa Tertinggal
KK	: Kepala Keluarga
KM	: Konsultan Managemen
KPPN	: Kantor Perbendaharaan Pembangunan Negara
KT	: Kader Teknik
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
MAD	: Musyawarah Antar Desa
MD	: Musyawarah Desa
MKP	: Musyawarah Khusus Perempuan
P3DT	: Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal
PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
PKK	: Program Kesejahteraan Keluarga
PKT	: Program Kemiskinan Terpadu
PL	: Pendamping Lokal
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RK	: Rukun Kampung
RPD	: Rencana Penggunaan Dana
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SPP	: Simpan Pinjam Perempuan
SPPB	: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
UEP	: Usaha Ekonomi Produktif
UPK	: Unit Pengelola Kegiatan
TPK	: Tim Pengelola Kegiatan
TPU	: Tim Penulis Usulan

WID : Women in Development

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner
2. Peta Kecamatan Wonosalam
3. Peta Kabupaten Demak
4. Laporan Kesehatan UPK Bulan Mei 2008
5. Variabel Partisipasi Perempuan sebelum dan sesudah PPK
6. Variabel Partisipasi Perempuan pada Program lain sebelum PPK
7. Variabel Partisipasi Perempuan pada Kegiatan UEP pada PPK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dan Cita – cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia dengan tujuan Masyarakat Adil dan Makmur terutama pada arah kebijakan ekonomi yang menyatakan bahwa Pembangunan Nasional harus mampu mengupayakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada masa-masa sekarang ini, Indonesia mempunyai masalah antara lain kemiskinan. Hal ini terjadi karena pengaruh dari krisis moneter yang dialami Indonesia, sehingga banyak pengangguran yang akan berpengaruh terhadap keterbelakangan pengetahuan. Kemiskinan dapat diukur dengan tingkat pendapatan. Seseorang disebut miskin apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Dalam laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Demak tahun 2004, keluarga miskin dapat dibagi menjadi dua bagian / kriteria yaitu :

1. Keluarga miskin sekali

Keluarga miskin sekali apabila keluarga yang tidak dapat memenuhi 1 s/d 3 dari 6 (enam) indikator penentu

2. Keluarga Miskin

Keluarga miskin apabila keluarga tidak mampu memenuhi 4 s/d 6 dari indikator penentu.

Adapun 6 (enam) indikator penentu kemiskinan menurut BKKBN tersebut adalah :

- 1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
- 2) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk keperluan di rumah, sekolah dan bepergian.
- 3) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- 4) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/telur/ikan.
- 5) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun sekali.
- 6) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Indonesia diukur dari indikator dari BKKBN pada tahun 1997 sampai 2006 dapat dilihat pada Tabel 1 .

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 1997 – 2006

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase (%)
1997	194,67	34,01	17,47
1998	204,29	49,50	24,23
1999	112,39	47,97	23,43
2000	202,19	38,70	19,14
2001	205,87	37,90	18,41
2002	210,98	38,40	18,20
2003	179,68	31,30	17,42
2004	216,69	36,10	16,66
2005	219,79	35,10	15,97
2006	220,00	39,05	17,75

Sumber : Diolah dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2006

Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Tabel 1, perkembangan tiap tahunnya hanya mengalami perubahan sedikit, hal ini dikarenakan krisis moneter yang menimpa Negara Indonesia dan menyebabkan banyak pengangguran sehingga mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat yang semakin menurun dan banyak masyarakat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak masih tinggi, yaitu lebih besar dari 50 %. Rincian jumlah keluarga miskin di kabupaten Demak dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah keluarga miskin Kabupaten Demak, Tahun 2002 - 2005.

Tahun	Jumlah Kel. (KK)	Jumlah Kel. Miskin (KK)	Persentase (%)
2002	206.004	147.110	56.58
2003	266.643	149.267	55.98
2004	274.768	151.287	55.06
2005	476318	266.643	55.98

Sumber : Statistik Kabupaten Demak, 2005

Berdasarkan Tabel 2. dapat disimpulkan / diketahui tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak dari tahun 2002 sampai 2005 tidak mengalami penurunan, persentase kemiskinan masih tinggi yaitu lebih besar 50%. Hal ini terjadi karena dengan terjadinya krisis moneter sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di perdesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, hasil dari bertani tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan hanya cukup untuk bertahan hidup karena biaya untuk mengolah lahan pertanian harganya semakin mahal sedangkan hasil panen yang mereka dapat harganya rendah. Apabila dikaitkan dengan tingkat kemiskinan per Kecamatan di Kabupaten Demak, Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah keluarga miskin Kecamatan Wonosalam, Tahun 2002 - 2007

Tahun	Jumlah Kel. (KK)	Jumlah Kel. Miskin (KK)	Prosentase (%)
2002	18.030	11.712	64.96
2003	18.086	11.273	62.33
2004	18.035	10.682	59.23
2005	18.028	11.237	62.33
2006	19.485	10.132	52.00
2007	20.210	10.398	51.45

Sumber : BKKBN Kecamatan Wonosalam, 2007

Dari Tabel 3 dapat dilihat jumlah KK miskin di Kecamatan Wonosalam juga masih di atas 50 %, bahkan keadaannya lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada Kabupaten.. Hal ini terjadi karena krisis moneter serta terjadinya penurunan tingkat perekonomian baik secara nasional maupun secara lokal pada tahun 1997.

Untuk penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia mulai Tahun 1994 telah meluncurkan Program Pengentasan Kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Kemiskinan Terpadu (PKT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), sedangkan mulai tahun 2002 Program Pengentasan Kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah Indonesia dikelola oleh Departemen atau Lembaga Pengelola.

Pada Tahun 1998, Pemerintah Indonesia mulai meluncurkan Program Penanggulangan Kemiskinan yang bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan

penyediaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Demak dimulai tahun 1998 disebut fase I yang meliputi Kecamatan : Bonang, Wedung, Karangtengah, Karanganyar, Demak dan Dempet. Kemudian dilanjutkan fase II yang terdiri dari Kecamatan Karangawen, Guntur, Gajah dan Wonosalam. Khusus Kecamatan Wonosalam, PPK dimulai pada awal tahun 2003.

Sasaran Program Pengembangan Kecamatan adalah kelompok penduduk miskin pedesaan pada kecamatan miskin. Untuk kecamatan lokasi PPK ditentukan oleh team koordinasi PPK Pusat dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan :

- b. Jumlah penduduk miskin dan peringkat kemiskinan.
- c. Kecamatan yang desa miskinnya banyak

Dalam pelaksanaan PPK mempunyai asas Dari Oleh Untuk Masyarakat (DOUM) dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1). Keberpihakan kepada orang miskin.
- 2). Transparansi
- 3). Desentralisasi
- 4). Partisipasi dan
- 5). Kompetisi sehat

Dalam pelaksanaan PPK, masyarakat diberi pelimpahan wewenang dan kebebasan yang penuh oleh pemerintah untuk mengelola, menentukan,

melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan melestarikan kegiatan sendiri. Dalam pelaksanaan PPK yang tidak kalah penting adalah keterlibatan kaum perempuan mulai dari perencanaan sampai pelestarian. Dalam kegiatan ini perempuan diberi kesempatan untuk menentukan usulan dari kaum perempuan mulai forum-forum pertemuan perempuan di tingkat kelompok, Dusun dan ditetapkan pada Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) di tingkat desa. Dalam pengusulan ini perempuan diberi kesempatan untuk mengusulkan 2 (dua) usulan dari 3 (tiga) usulan yang akan ditetapkan pada Musyawarah Desa (MD) penetapan usulan. Dua usulan dari MKP meliputi usulan Simpan Pinjam untuk perempuan (SPP) dan 1 usulan lainnya dari hasil MKP (UEP, sarana/prasarana, kesehatan, pendidikan, dan pelatihan). Hasil keputusan dari MKP di MD penetapan usulan tidak lagi dibahas melainkan tinggal penetapan saja.

Hasil dari Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) di desa-desa se Kecamatan Wonosalam semua mengusulkan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Perkembangan kelompok dan anggota kelompok perempuan yang mengusulkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Wonosalam pada tahun 2003 sampai tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah kelompok, anggota pemanfaat usaha ekonomi produktif dan jumlah anggaran yang diusulkan pada PPK di Kecamatan Wonosalam Tahun 2003 – 2005.

No	Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Perempuan	Jumlah Usulan (Rp.)
1	2003	104	1.056	685.500.000
2	2004	62	666	568.350.000
3	2005	50	530	561.500.000
	Total	216	2.252	2.815.350.000

Sumber : Lap. Akhir tahun UPK PPK Kecamatan Wonosala, 2005

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa selama 3 tahun pelaksanaan PPK di Kecamatan Wonosalam sudah terbentuk 216 kelompok dengan jumlah anggota perempuan 2.252 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan PPK. Dari dana Rp. 3.000.000.000,- selama tiga tahun untuk kegiatan SPP dan UEP, sebesar Rp. 2.815.350.000, berasal dari usulan perempuan dan yang sisanya untuk sarana/prasarana dan pendidikan. Jumlah kelompok maupun anggota yang mengusulkan PPK untuk kegiatan UEP setiap tahunnya mengalami penurunan karena kelompok – kelompok yang belum mengusulkan pada program mengusulkan melalui dana perguliran. Selain dari dana program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wonosalam juga sudah melaksanakan 8 (delapan) kali perguliran dengan jumlah kelompok 154 dan jumlah anggota 1.239 orang (perempuan) dengan besar dana Rp. 2.024.250.000,-

Tabel 4. juga menunjukkan bahwa partisipasi kelompok perempuan pada Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wonosalam cukup tinggi. Hal ini terjadi tidak lepas dari bimbingan pelaku PPK di tingkat Kecamatan dan bimbingan tim pelaksana kegiatan di tingkat desa yang secara langsung membimbing kelompok-kelompok perempuan untuk berpartisipasi. Agar pelaksanaan PPK khususnya kegiatan UEP berkesinambungan tahap demi tahap sesuai dengan perkembangannya untuk mencapai kemandirian kelompok diperlukan proses pemberdayaan dengan cara pendampingan-pendampingan ketua kelompok, yang dilaksanakan oleh UPK tingkat kecamatan dan Tim Pelestari Desa (TPD) di tingkat desa.

Kegiatan PPK dengan melibatkan perempuan akan diperoleh usulan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, selain itu tanpa proses pemberdayaan yang berkesinambungan dan melibatkan partisipasi aktif anggota-anggota kelompok perempuan itu sendiri akan sangat sulit untuk mencapai tujuan dari PPK yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di muka maka dapat diidentifikasi beberapa masalah untuk diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah Tingkat partisipasi perempuan di Kecamatan Wonosalam sebelum ada program PPK ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat khususnya perempuan terhadap PPK ?

3. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
5. Bagaimana dampak partisipasi perempuan di Kecamatan Wonosalam terhadap keberhasilan dalam kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat partisipasi perempuan pada program lain sebelum Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
2. Persepsi masyarakat khususnya perempuan terhadap PPK.
3. Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada PPK di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada PPK di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
5. Dampak partisipasi perempuan terhadap keberhasilan kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bagi Pemerintah , Khususnya Pemda Kabupaten Dati II Demak dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan.
2. Bahan masukan penyusunan strategi pembangunan partisipasi masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan dan Program Pengembangan Masyarakat pada umumnya.
3. Masukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan pasrtisipasi aktif perempuan dalam kegiatan Program Pengembangan Kecamatan.
4. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S2 Prodi Penyuluhan Pembangunan di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Friedmann (1993), kata pemberdayaan (*empowerment*) mengandung arti adanya sikap mental yang tangguh, Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif kelompok, tetapi karena proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi , hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dimiliki sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Menurut Mas'ood dalam Totok Mardikanto (2003:83), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberdayakan (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha atau upaya yang membuat masyarakat untuk bisa merubah kondisi sosial, ekonomi menjadi lebih baik dengan mengembangkan potensi yang ada, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, menggali potensi sosial ekonomi masyarakat agar lebih berdaya dalam pembangunan untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan masyarakat agar dapat

memecahkan permasalahan yang dihadapi dan dapat mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Pada kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), pembangunan yang dilaksanakan selalu melibatkan masyarakat untuk terlibat / berpartisipasi mulai dari perencanaan (menetapkan usulan kegiatan), pelaksanaan, pengawasan, pelestarian dan masyarakat diajari untuk berdaya agar dapat memperbaiki kehidupan.

Kusnaka (2001:3), berpendapat konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. McARDle dalam Kusnaka (2001:3), mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Konsep pemberdayaan lebih menekankan masyarakat sebagai subyek, maka konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yang dikemukakan oleh Korten (1988), dapat dipandang sebagai salah satu konsep pemberdayaan, karena konsep yang dikemukakan adalah manusia dipandang sebagai warga masyarakat yang menjadi fokus atau sumber utama pembangunan sehingga masyarakat harus mampu berperan aktif dalam pembangunan

Kartasmita (1995:19), mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim

yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah, oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat.

Salah satu prasyarat bagi pengembangan pemberdayaan rakyat adalah perlunya kondisi keterbukaan yang lebih besar dalam masyarakat, kalau tidak ada keterbukaan, gerakan pengembangan masyarakat yang berkembang dapat menjadi gerakan yang destruktif, karena dapat tampil sebagai reaksi terhadap kontrol, akibatnya ketegangan dapat timbul antara kebutuhan mengembangkan keberdayaan rakyat dan kecenderungan pemerintah untuk mempertahankan kontrol terhadap masyarakat (Korten, 1988:64).

2. Gender

Menurut Cleves Julia (2004:3), gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminisme atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender”.

Menurut Mansour Fakih (2004:8-9), gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang artinya sex dan gender, pengertian kata sex

(jenis kelamin) merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai alat kelamin yang melekat secara biologis tidak bisa dipertukarkan dan secara permanent tidak bisa berubah karena merupakan ketentuan biologis dan dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang di kontruksikan secara sosial dan kultural, misalnya perempuan dikenal dengan lembut, cantik, emosional dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.

Konsep jender mengembangkan dua pendekatan, yaitu peran jender dan analisa hubungan sosial (Razavi dan Miller,1995:14-15). Fokus pendekatan peran jender terutama pada distribusi peran dan sumber daya dalam rumah tangga.

Agar perencanaan jender dapat berhasil diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan perempuan dalam kebijakan nasional secara makro, selain itu diperlukan upaya meningkatkan kesadaran jender dalam masyarakat, khususnya dalam kalangan para pengambil keputusan, perencanaan dan birokrat sebagai pelaksana pembangunan (Van Bemmelen,1993:171).

3. Perempuan dalam Pembangunan

Menurut Mansour Fakih (2004:26), pembangunan yang semboyannya untuk mensejahterakan dan menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ke tiga tersebut justru telah mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan, dan Women in Development (WID) yang dicita-citakan sebagai jawaban atas kritik terhadap pembangunan, juga dianggap gagal menjalankan

tugasnya, karena program ini hanya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan.

Dalam perkembangan sejarah manusia pada masa lalu telah menciptakan mitos hubungan antara pria dan perempuan, yang pada akhirnya cenderung menempatkan perempuan pada posisi terbelakang. Beberapa pakar mencoba menggali akar historis dan akar struktural dari keterbelakangan (Higligns of the Philippine Development Plan for Women dalam Moeljarto Tjokrowinoto, 2002 : 59) tersebut yaitu :

- a. Adanya dikhotomi maskulin/feminim peranan perempuan sebagai akibat dari determinisme biologis, sering mengakibatkan proses marginalisasi perempuan.
- b. Adanya dikhotomi peran public/peran domestic yang berakar dari syndrome bahwa “peran perempuan adalah di rumah” pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif antara pria dan perempuan.
- c. Adanya konsep “beban kerja ganda” yang melestarikan bahwa tugas perempuan terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung menghalangi proses aktualisasi potensi perempuan secara utuh, dan
- d. Adanya syndrome subordinasi dan peran marginal perempuan telah melestarikan wawasan bahwa keberadaan fungsi perempuan dalam masyarakat adalah bersifat sekunder.

Dari hasil world survey on Women in development oleh Moelyato Tjokrowinoto, (2002 : 61) dapat disimpulkan bahwa pada tingkat global, harapan konstitusional serta konperensi internasional tentang kedudukan perempuan dalam

masyarakat dan peranannya dalam pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

Secara umum peranan perempuan dapat disampaikan bahwa :

- a. Sumbangan perempuan dalam pembangunan ekonomi cukup besar, satu diantaranya karyawan industri, dan empat diantara sepuluh pekerja dibidang pertanian dan jasa adalah perempuan.
- b. Perempuan memberikan 66 persen dari jam kerjanya, akan tetapi hanya mendapat 10 persen dari upahnya.
- c. Perempuan menikmati lebih sedikit dari pria sebagai hasil kontribusinya pada produksi nasional, rata-rata upah per jamnya lebih rendah dari pada pria, perlindungan hukum bagi perempuan lebih rendah dari pria, perempuan terbatas pada buruh kasar dengan bayaran rendah, akses kepada sumber-sumber produksi lebih kecil dari pria, dan sebaliknya.

Pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan wanita dalam pembangunan (WID) antara lain dikaji oleh Mosher (1993:55-79), yang mengemukakan lima pendekatan sebagai berikut (1) Pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*), (2) pendekatan keadilan (*the equity approach*), (3) pendekatan pengentasan kemiskinan (*the anti-poverty approach*), (4) pendekatan efisiensi (*the efficiency approach*) dan (5) pendekatan pemberdayaan (*the empowerment approach*). Pendekatan pemberdayaan menekankan pada fakta bahwa wanita mengalami penekanan yang berbeda menurut bangsa, kelas sosial, sejarah penjajahan kolonial dan kedudukannya dalam orde ekonomi internasional pada masa kini. Dengan demikian wanita tetap harus menantang struktur dan situasi yang menekannya secara bersama pada tingkatan yang berbeda. Pendekatan ini juga

menekankan pentingnya wanita untuk meningkatkan keberdayaannya dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam kontek mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh wanita akan merupakan kehilangan bagi lelaki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan wanita untuk meningkatkan pendirian dan kekuatan dalam dirinya yang dikenal sebagai ” *the right to determine choices in life and to influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and nonmaterial resources.*” (Seitz, 1995:11-12).

Pemberdayaan wanita sebagai mitra sejajar dengan pria adalah kondisi dimana pria dan wanita memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. Perwujudan kemitrasejajaran yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama pria dan wanita (Tan, 1995:5). Untuk mencapai kesetaraan wanita dan pria diperlukan transformasi nilai yang berkaitan dengan perubahan hubungan jender dan keseimbangan kekuasaan antara lelaki dan perempuan (Triwijati, 1996:359).

4. Persepsi Masyarakat

Menurut Isbandi Rukminto Adi (1994:105), persepsi adalah proses menginterpretasikan rangsangan (*input*) dengan menggunakan alat penerima informasi (*sensory information*). Persepsi ini menunjuk pada bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, mengecap dan mencium dunia di sekitar, sedangkan Robbin dalam Lucia Dewi (2008 : 31) mengemukakan bahwa persepsi adalah merupakan suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan mereka. Mar'at (1981:23) berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi, dimana persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor : pengalaman, proses belajar, pengetahuan, dan cakrawala. Young (1956 :59) mengemukakan bahwa persepsi menunjukkan adanya aktivitas panca indra, menginterpretasikan dan memberikan penilaian terhadap obyek-obyek fisik maupun sosial dan penginderaan ini tergantung pada stimulus fisik serta stimulus sosial yang ada di lingkungannya.

Oleh karena itu persepsi merupakan hasil dari suatu proses pengambilan keputusan tentang pemahaman seseorang kaitannya dengan sesuatu obyek, stimuli atau individu yang lain. Kesan tentang stimuli tersebut dapat dipandang sebagai pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat,1989 : 5). Tubbs dan Moss (1996 : 40) mengemukakan penafsiran tersebut mencakup banyak hal, antara lain : penafsiran tentang perilaku individu, keadaan lingkungan, suasana hati (keinginan,kemauan) dan harapan-harapan. Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Persepsi dapat berupa kesan, penafsiran atau penilaian berdasarkan pengalaman yang diperolehnya.
- (2) Persepsi merupakan hasil proses psikologis yang dialami seseorang setelah stimuli, yang mendorong tumbuhnya motivasi untuk memberikan respon.

(3) Persepsi merupakan keputusan yang diambil terhadap sesuatu obyek atau stimuli yang menyangkut perilaku individu, keadaan lingkungan, suasana hati dan harapan-harapan.

Menurut Lionberger dalam Mardikanto, (1996:112), ciri-ciri pribadi dan kesan latihan atau hasil belajar yang diduga kuat memiliki hubungan dengan persepsi dalam kaitannya dengan adopsi antara lain menyangkut “ aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru “ .

Mardikanto (1996:115), mengemukakan bahwa kosmopolitnes yang dicirikan oleh pemanfaatan media masa, dengan memahami bagaimana dan apakah yang mempengaruhi persepsi tersebut akan membantu kita memahami tingkah laku diri kita dan orang lain, sedangkan Sarwono (1999:94-97) mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami dengan menggunakan indera.

Biran (1978:20) mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh karakteristik rangsangan, situasi yang melatari kehadiran obyek, dan karakteristik pribadi sebagai faktor penentu yang paling kuat. Menurut Tubbs and Moss (1996:40,77-82), khusus yang berkaitan dengan karakteristik pribadi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi :

- (1) Kepribadian , kaitannya dengan penilaian terhadap sesuatu
- (2) Ramalan, tentang apa yang akan terjadi
- (3) Aksentuasi, tentang kondisi minimal yang dapat diterima
- (4) Kesan terhadap pengalaman yang pernah dialami
- (5) Konsistensi, untuk mempertahankan kondisi yang dialami/diinginkan

(6) Stereotip, atau citra

Adam Indrawijaya (2002:32), mengemukakan bahwa persepsi adalah dasar proses kognitif atau proses psikologis. Persepsi sebagai proses kognitif dimulai dengan menerima rangsangan yang datang dari luar, apa yang diterima dari luar akan memperoleh arti melalui proses belajar yaitu membandingkan pengalaman masa lalu dengan apa yang sedang diamatinya, dengan proses belajar ia akan membandingkan beberapa kemungkinan pilihan cara pemecahannya untuk kemudian sampai pada pilihan tertentu, pilihan yang dipilih akan tercermin dalam perilaku yang akan tampak nyata dalam tindakannya.

4. Partisipasi

Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses dimana mereka dapat menegaskan kontrol dengan efektif (Drajat Tri Kartono, 2004:42). Partisipasi dapat dikategorikan menjadi dua, *Pertama*, Warga dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan di kontrol oleh orang lain. *Kedua*, Partisipasi adalah proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subyek yang sadar.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta merencanakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan suatu bentuk dari interaktif komunikasi yang

berkaitan dengan pembagian wewenang, tanggung jawab dan manfaat (Margono Slamet, 2003 : 8), sedangkan menurut Mubyarto dalam Suparjan dan Hempri (2003 : 58), mendefinisikan bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingannya sendiri.

Prijono dan Pranarka (1996:133), Partisipasi mendukung masyarakat untuk memulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka.

Menurut Hanna Djumhana Bastaman (1995 : 101-103), dua macam jenis partisipasi yang dapat dipahami dari praktek yang dijalani di masyarakat adalah partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Perbedaan terhadap dua partisipasi tersebut kadang sulit dipahami, misalnya terjadi manakala pada suatu musyawarah seseorang hanya ikut menyetujui pendapat orang lain. Ketika kejadian seperti ini yang dapat dipahami adalah kehadirannya dihitung sebagai partisipasi namun sikap persetujuannya tanpa adanya dukungan pendapat dianggap kehadirannya tersebut adalah pasif, namun demikian yang umum dipahami adalah jika keikutsertaannya dalam suatu kegiatan disertai dengan kelakuan baik berupa pendapat lisan (*verbal*) ataupun tingkah laku (perbuatan), maka ia dapat disebut sebagai partisipasi aktif, sedangkan sikap diam dan hanya menyetujui akan jalannya suatu kegiatan disebut sebagai partisipasi pasif.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proyek-proyek atau program-program pembangunan maupun pelaksanaannya.

Diana dalam Suparjan dan Hempri (2003 : 53), mengemukakan ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting, pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena akan timbul rasa memiliki terhadap proyek tersebut, alasan ke tiga partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hal demokrasi jika masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang dilaksanakan di daerah mereka.

Menurut FAO (Mikkelsen, 2003 : 64), partisipasi dapat ditafsirkan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi adalah kontribusi suka rela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

- 3) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Berdasarkan pengertian partisipasi dalam pembangunan, maka partisipasi dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :

- 1) Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
 - 2) Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
 - 3) Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
 - 4) Menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
 - 5) Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya
- (Margono Slamet, 2003 : 8).

Menurut Pretty (1994) dalam Isbandi Rukminto Adi (1994 : 106 -109), ada 7 macam tipologi partisipasi dalam program atau proyek kegiatan antara lain :

- 1) Partisipasi pasif adalah orang berpartisipasi hanya diketahui saja apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi, dalam hal ini orang yang berpartisipasi sama sekali tidak memberi tanggapan apapun .
- 2) Partisipasi informatif, yaitu orang yang hanya berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan si peneliti melalui jawaban tertulis , angket atau sejenisnya, dengan demikian responden hanya memberi jawaban saja tanpa memberi kesempatan untuk mempengaruhi hasil yang akan dicapai.
- 3) Partisipasi dengan konsultan, adalah orang yang berpartisipasi hanya dengan diberi pertanyaan dan agen eksternal mendengarkan pendapat – pendapatnya, namun demikian semua pendapat partisipan tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan, semua jawaban dan pendapat partisipan hanya digunakan sebagai referensi yang dapat dimodifikasi sendiri oleh agen eksternal.
- 4) Partisipasi untuk insentif material, partisipasi orang yang hanya memberikan sumber dayanya saja, orang dalam tipe ini berpartisipasi untuk mendapatkan imbalan jasa, baik berupa makanan, upah uang tunai atau berupa material lainnya. Misalnya kaum buruh perusahaan, mereka akan mendapat upah uang tunai apabila telah mengerjakan sejumlah pekerjaan tertentu dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan
- 5) Partisipasi Fungsional, orang berpartisipasi dengan cara membentuk yang berkaitan dengan proyek, dapat mencakup pengembangan atau promosi organisasi sosial yang dimulai secara eksternal. Ada dua hal yang

mempengaruhi pelaksanaan pembentukan kelompok ini, pertama sisi eksternal yaitu peranan fasilitator, dan kedua internal yaitu sikap diri pribadi.

- 6) Partisipasi interaksi, orang berpartisipasi secara aktif dalam menganalisis dan menghasilkan rencana tindakan serta membentuk institusi – institusi lokal baru yang mendukung institusi yang sudah ada, partisipasi ini yang sangat dibutuhkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna yang mempunyai perspektif dan biasanya menggunakan proses pembelajaran sistematis dan terstruktur.
- 7) Mobilisasi diri, adalah orang yang berpartisipasi dengan cara mengambil keputusan sendiri untuk merubah sistem yang terlepas dari pengaruh eksternal, tipe partisipasi ini adalah bentuk kerja sama suatu kelompok dengan kelompok lainnya dalam suatu kegiatan tertentu.

Menurut Daldjoeni (Rohmad, 1994 :29), partisipasi akan dipengaruhi oleh manusia, lingkungan dan kebutuhan. Seseorang ahli antropologi menyatakan partisipasi dipengaruhi oleh budaya yang ada atau berlaku di masyarakat (Manan dalam Rohmad ,1994:29), sedangkan menurut Rogers dan Schumakers (Rohmad, 1994:31), partisipasi dipengaruhi oleh karakteristik sosiologis individu dan terpaan massa, menurutnya semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan dan prestasi pekerjaan, seseorang akan semakin tinggi partisipasinya. Lioberger dan Gwin (Rohmad, 1994:31) mengatakan bahwa partisipasi individu tergantung pada kondisi individu dan fungsi situasi. Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor : (1) Budaya, (2) karakteristik sosiologis individual dengan faktor perantara, (3) Ketersediaan

pemimpin dalam pembagian kekuasaan (4) Keterdedahan media masa, dan (5). Kondisi psikologis (Rohmad, 1994:31).

Dengan kemampuan warga dalam berpartisipasi, maka diharapkan masyarakat dapat mencapai kemandirian yang dapat dikategorikan sebagai “*Kemandirian material*”, “*Kemandirian intelektual*”, dan “*Kemandirian manajemen*”,.. Kemandirian material tidak sama dengan konsep mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis. Kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan otonomi oleh komunitas yang memungkinkan mereka mengulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol terhadap pengetahuan itu, sedangkan kemandirian manajemen adalah kemampuan otonomi umum untuk membina diri dan menjalani serta mengelola kehidupan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan mereka.

5. Program Pengembangan Kecamatan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan perwujudan nyata dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan mengacu kepada azas PPK yaitu : Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat (DOUM). Cakupan jenis kegiatannya terbuka luas (open menu) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, maka PPK dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan, serta media mewujudkan

masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Pengembangan konsep PPK ini juga diarahkan kepada penyelenggaraan pemerintah yang baik. Beberapa proses dan kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK selalu mempertimbangkan agar dapat mendukung pencapaian pemerintah yang baik.

Seluruh proses kegiatan dalam PPK pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yaitu :

- a. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
- b. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

Secara umum tujuan PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun tujuan khusus PPK meliputi :

- a. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- b. Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan.
- c. Mendorong kelembagaan sistem sarana prasarana ekonomi, pendidikan, dan atau kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sarana utama PPK adalah kelompok penduduk miskin pedesaan pada kecamatan miskin. Kecamatan lokasi PPK ditentukan oleh tim koordinasi PPK Pusat dengan dikoordinasi dengan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan :

- a. Jumlah Penduduk Miskin
- b. Peringkat Kemiskinan
- c. Prinsip-prinsip dalam PPK adalah (1) Keberpihakan kepada orang miskin, (2) Transparansi, (3) Partisipasi, (4) Desentralisasi, (5) Kompetisi sehat.

Dalam proses pelaksanaan PPK dibagi menjadi tiga tahap yang terdiri dari (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pelestarian.

Tahap Perencanaan terdiri dari beberapa proses yaitu :

- a. Musyawarah Antar Desa I (MAD Sosialisasi)

Tujuan MAD I adalah sosialisasi tentang PPK di tingkat kecamatan, pesertanya terdiri dari wakil-wakil utusan dari semua desa se kecamatan yang masing-masing desa terdiri dari 6 orang (Lurah Desa, Ketua TPK, Wakil masyarakat laki-laki 1 orang dan Wakil masyarakat perempuan 3 orang), selain sosialisasi juga disepakati aturan main dan sanksi serta jadwal Musyawarah Desa I (MD I).

- b. Musyawarah Desa I (MD I)

Dalam musyawarah Desa I agenda yang dilakukan adalah sosialisasi PPK ditingkat Desa, Pemilihan pelaku PPK tingkat desa yang terdiri dari Tim Pelaksanaan Kegiatan 3 orang (Ketua, Bendahara, Sekretaris), Fasilitator Desa 2 orang (laki-laki dan perempuan).

c. Sosialisasi dan Penggalian Gagasan

Kelompok yang dimaksud dalam proses sosialisasi dan penggalian gagasan disini adalah sekumpulan warga masyarakat yang tergabung dalam ikatan kemasyarakatan yang dapat berlatar belakang wilayah (misal RT/RW/RK/Desa/Kampung atau yang lainnya), kelompok-kelompok yang sudah ada (kelompok arisan, kelompok usaha bersama, kelompok keagamaan dan lainnya dan kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi setempat. Tujuan dalam kegiatan ini adalah memperkenalkan PPK kepada kelompok laki-laki, perempuan atau campuran, menggali gagasan kegiatan untuk diusulkan dalam musyawarah khusus perempuan dan musyawarah desa II dan menentukan utusan kelompok/dusun ke musyawarah khusus perempuan dan musyawarah desa II.

d. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)

Musyawarah Khusus Perempuan merupakan pertemuan di tingkat desa yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan-gagasan yang berasal dari kelompok-kelompok perempuan. Tujuan dari pertemuan ini adalah menentukan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi perempuan meliputi (1) kegiatan pembangunan prasarana, kegiatan usaha ekonomi produktif, kegiatan bidang kesehatan, kegiatan bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat (kegiatan bidang pelatihan), (2) Menentukan usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan yang masih berjalan aktif dan berusia minimal satu tahun, (3) Memilih wakil perempuan untuk hadir dalam

musyawarah antar desa II, dan (4) Memilih wakil perempuan yang terlibat dalam penulisan usulan.

e. Musyawarah Desa II

Musyawarah Desa II merupakan pertemuan di tingkat desa yang dihadiri oleh wakil perempuan dan laki-laki untuk membahas usulan yang akan ditetapkan menjadi usulan desa. Tujuan dari Musyawarah Desa II adalah (1) menegaskan usulan-usulan kegiatan hasil Musyawarah khusus perempuan dan menetapkan usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan desa ke musyawarah antar Desa II, dan (2) menetapkan enam wakil desa ke musyawarah antar desa II dan III, Tim Penulis Usulan (TPU), calon pengurus UPK, calon pengamat proses musyawarah antar Desa.

f. Musyawarah Antar desa II

Musyawarah Antar Desa II merupakan pertemuan di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil desa yang bertujuan untuk (1) memilih dan menetapkan UPK, (2) menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulan kegiatan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati, (3) menetapkan jadwal musyawarah antar desa III serta waktu penyelesaian pembuatan desain dan RAB, (4) pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan, dan (5) mendapatkan umpan balik dari forum mengenai kualitas pendampingan Konsultan Manajemen Kabupaten (KM.Kab.), Fasilitator Kecamatan (FK), Pendamping Lokal (PL) dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam PPK.

g. Musyawarah Antar Desa III

Tujuan dari Musyawarah Antar desa III adalah (1) membahas dan menetapkan jenis kegiatan yang akan didanai oleh PPK berikut besar dananya, (2) menyusun jadwal pelaksanaan PPK, (3) menyepakati sanksi-sanksi dan tata cara perguliran yang akan diterapkan selama pelaksanaan PPK di wilayah kecamatan tersebut serta (4) memilih minimal 3 orang wakil Musyawarah Antar Desa sebagai keluhan yang timbul selama proses di tahap sosialisasi dan perencanaan.

h. Musyawarah Desa III

Musyawarah Desa III merupakan musyawarah yang dilaksanakan di desa baik desa didanai maupun desa yang tidak didanai PPK, Tujuan dari pertemuan ini adalah (1) menyampaikan hasil musyawarah Antar Desa III kepada masyarakat, (2) menetapkan susunan lengkap TPK, (3) menyepakati besar intensif pekerja dan tata cara pembayarannya, (4) jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan, (5) sanksi-sanksi yang akan diberlakukan di desa tersebut, menjelaskan mekanisme pengadaan bahan dan alat, realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat, dan (6) membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan PPK.

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu :

Pelaksanaan :

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan PPK bagi desa yang didanai PPK baik usulan SPP, UEP, Pendidikan, Kesehatan, maupun sarana rasarana dan

Pelatihan. Untuk kegiatan SPP dan UEP, pencairan dana dilaksanakan langsung 100% dengan cara UPK mencairkan ke TPK yang diteruskan langsung ke ketua kelompok dibagikan langsung ke anggota peminjam dan langsung dilakukan Musyawarah Pertanggungjawaban dana dan Musyawarah Serah Terima. Musyawarah ini dilaksanakan di desa dengan peserta Pelaku PPK tingkat Desa, Ketua kelompok, Peminjam dan tokoh masyarakat untuk menyaksikan penyaluran dana.

Untuk kegiatan sarana prasarana, pencairan dana dilakukan sesuai kebutuhan (paling sedikit 3 kali). Setiap akan melakukan pencairan berikutnya TPK harus melakukan Musyawarah Pertanggungjawaban dana yang sudah dicairkan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan Musyawarah serta Terima Kegiatan oleh TPK kepada masyarakat, musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan pertanggungjawaban dana dan serah terima hasil kegiatan kepada masyarakat untuk dimiliki masyarakat dan dilestarikan.

Pelestarian :

Tahap pelestarian adalah tahap setelah kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelestari Desa . Untuk kegiatan SPP dan UEP pelestarian dengan cara pengembalian yang aktif atau lancar ke UPK, kemudian UPK melalui MAD perguliran akan menggulirkan dana yang ada. Proses perguliran hampir sama dengan mekanisme program yaitu kelompok membuat Proposal yang sudah disetujui melalui MKP maupun MD kemudian akan dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi dan akan dirangking / diprioritaskan melalui MAD perguliran. Untuk kegiatan Sarana Prasarana akan dilakukan pelestarian dengan cara pemeliharaan secara kontinyu dengan dana swadaya masyarakat.

6. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah salah satu kegiatan yang didanai dalam PPK yang merupakan dana bergulir dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Kegiatan UEP disalurkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok yang sudah berjalan dengan jenis kelompok peminjam digolongkan menjadi tiga (3) kelompok yaitu :

- i. Kelompok simpan pinjam adalah kelompok yang mengelola simpanan anggota dan pinjaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota.
- ii. Kelompok usaha bersama adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha sejenis yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok.
- iii. Kelompok anaka usaha adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha bermacam-macam atau yang dikelola secara individual oleh masing-masing anggota (DEPDAGRI,2005)

Pada Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wonosalam jenis kelompok yang ada adalah kelompok simpan pinjam dan kelompok aneka usaha. Untuk mengusulkan kegiatan UEP kelompok harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh program yaitu : kelompok harus sudah berdiri lebih dari satu tahun, mempunyai pengurus dan anggota tetap, mempunyai kegiatan rutin, mempunyai pertemuan rutin, mempunyai buku administrasi kelompok serta anggota yang mengajukan pinjaman harus mempunyai kegiatan ekonomi produktif.

Kegiatan UEP merupakan kegiatan yang bergulir, perguliran dilakukan di tingkat Kecamatan berdasar pada keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD), sasaran perguliran adalah kelompok masyarakat di seluruh desa yang ada di

Kecamatan atau sesuai dengan aturan tingkat lokal yang berlaku. Pengelolaan perguliran di tingkat kecamatan dilakukan oleh UPK dan forum MAD dengan melibatkan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk di tingkat kecamatan yaitu Badan Pengawas UPK (BP UPK), Tim Verifikasi (TV) dan kelompok dengan berdasarkan mekanisme peguliran yang sudah disepakati pada MAD.

Mekanisme perguliran yang ditetapkan MAD harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu :

- a) Mengacu pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir.
- b) Memenuhi aturan pokok perguliran
- c) Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi bersama dengan UPK
- d) Kelompok penerima pinjaman telah diverifikasi dan diputuskan oleh MAD baik secara langsung atau dengan menggunakan pola daftar tunggu.
- e) Penyaluran pinjaman langsung dari UPK ke kelompok dan pengembalian pinjaman secara langsung dari kelompok ke UPK.
- f) Tidak menyalurkan ke kelompok yang mempunyai reputasi jelek dalam meminjam.
- g) Jika disalurkan ke kelompok dengan pola *executing* harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pengelola Pinjaman (DEPDAGRI, 2005 :6)

B. Kerangka Berpikir

Dalam upaya Pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia, Program Pengembangan Kecamatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian seluruh rakyat Indonesia, khususnya perempuan. Sebagai program yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan, meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan, mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan, mendorong kelembagaan sistem pembangunan partisipatoris dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana ekonomi, pendidikan dan atau kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sasaran utama PPK adalah kelompok penduduk miskin di Pedesaan.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pertama kali mulai tahun 1998, dan untuk Kecamatan Wonosalam dimulai pada tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2005. Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wonosalam mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat khususnya kelompok perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jenis usulan yang diajukan dari Musyawarah Kelompok Perempuan berupa usulan SPP dan Kegiatan UEP yaitu untuk perkembangan kegiatan baik SPP maupun UEP di Kecamatan Wonosalam sangat baik, ini dibuktikan semakin banyak kelompok perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan UEP dan tingkat pengembalianpun berjalan baik walaupun sudah tidak mendapat program lagi. Di Kecamatan Wonosalam kelompok yang berpartisipasi meminjam SPP dan UEP sebanyak 804 kelompok dengan jumlah anggota 8.586 orang, dengan jenis usaha yang beraneka ragam, diantaranya dagang, ternak, jasa dan tani yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 : Jumlah kelompok, anggota dan kegiatan SPP dan UEP di Kecamatan Wonosalam, tahun 2008.

No	Desa	Jumlah		Kegiatan			
		Kelompok	Anggota	Dagang	Ternak	Jasa	Tani
1	Mrisen	59	568	137	-	-	431
2	Bunderan	29	602	140	33	-	429
3	Kuncir	90	813	261	45	-	507
4	Getas	38	473	121	36	-	316
5	Sidomulyo	85	767	152	23	-	592
6	Pilangrejo	73	712	236	28	21	427
7	Tlogorejo	66	809	119	32	-	658
8	Jogoloyo	13	176	129	-	-	47
9	Mojodemak	70	809	132	-	-	677
10	Kendaldoyong	19	262	91	41	-	130
11	Lempuyang	21	164	79	23	-	62
12	Mranak	18	279	80	-	-	191
13	Wonosalam	43	277	88	-	39	150
14	Botorejo	19	277	79	46	-	152
15	Doreng	10	259	97	34	-	128
16	Karangrejo	57	592	410	-	-	182
17	Trengguli	40	238	74	-	-	164
18	Kerangkulon	29	217	34	27	-	156
19	Karangrowo	14	154	53	-	-	101
20	Kalianyar	8	102	32	-	-	70
21	Tlogodowo	3	30	-	-	-	30
Jumlah		804	8580	2544	368	60	5608

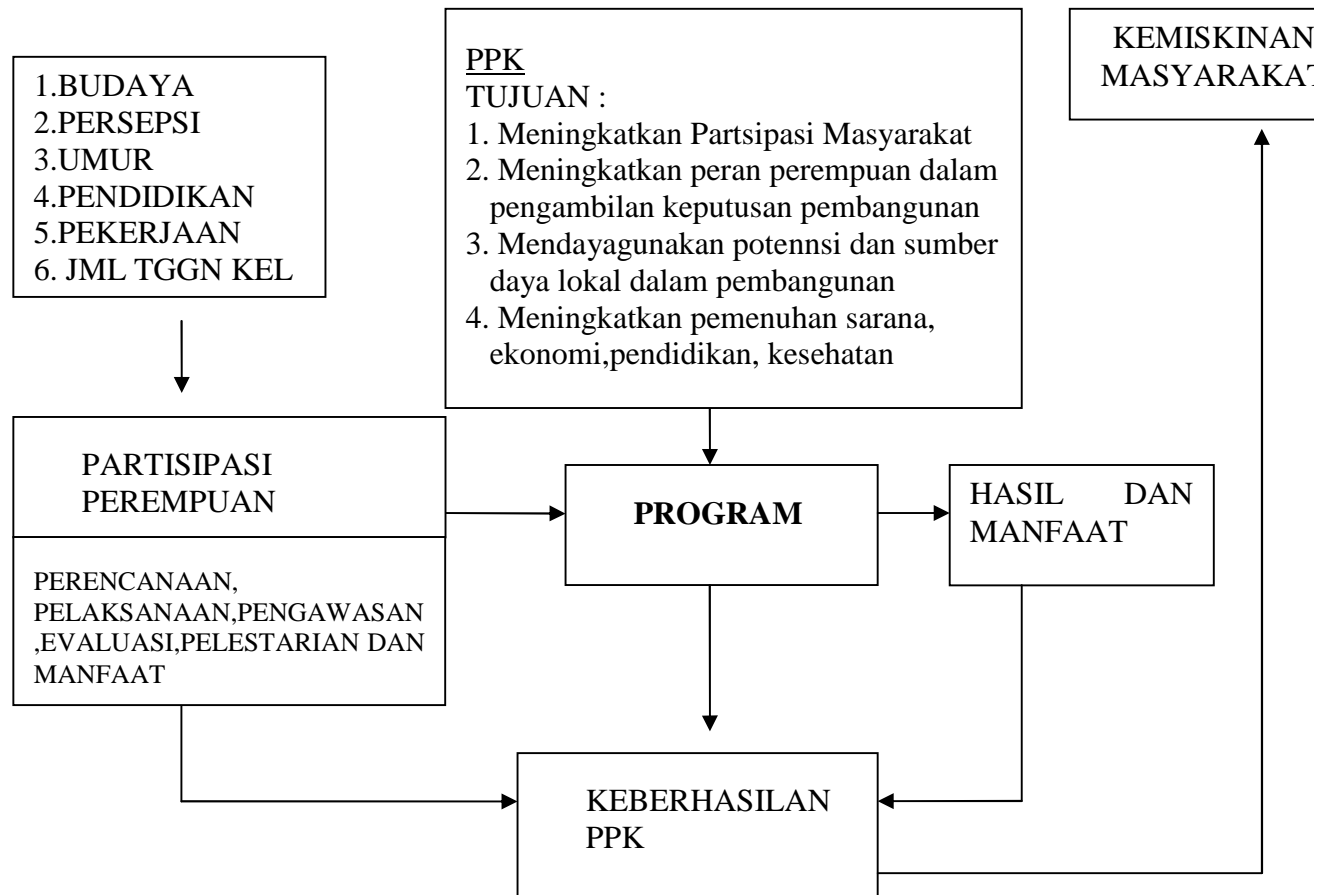
Sumber : Laporan UPK PPK Kecamatan Wonosalam, 2008

Keberhasilan pelaksanaan PPK di Kecamatan Wonosalam selain dari peran UPK ,Tim Pelestari Desa di masing-masing Desa dan tak lepas dari partisipasi kelompok perempuan yang sangat tinggi. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mengembangkan kelembagaan kelompok, sehingga menjadi kelompok yang aktif,

sehat, partisipatif dan bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Variabel-variabel penelitian yang akan dikemukakan dalam analisa ini adalah pengembangam masyarakat, partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP, dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelestarian dan manfaat. Faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam PPK yaitu sosial budaya, persepsi masyarakat dan faktor internal dari masyarakat yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga

Kerangka berfikir mengenai partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 : *Partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada Program Pengembangan Kecamatan.*

Berdasarkan permasalahan yang ada yang lebih menekan pada partisipasi perempuan yang dipengaruhi oleh sosial budaya, persepsi dan faktor internal (umur, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan keluarga), maka penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong (2004:9) mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah

apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Secara lengkap yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah dengan alasan Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu Kecamatan yang memperoleh dana PPK dan tidak memperoleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), selain itu, Kecamatan Wonosalam mempunyai potensi cukup baik yang ditandai dengan adanya 804 kelompok-kelompok perempuan untuk kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) khususnya UEP. Kegiatan ini sampai saat ini berjalan dengan baik dan dibuktikan dengan laporan Tahunan Unit Pengelola Kegiatan PPK di Kecamatan Wonosalam dalam kategori Sehat.

B. Bentuk / Strategi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian *kualitatif deskriptif* yang lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi (2002:1) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Furchan dalam Basrowi Sudikin,2002:1).

Menurut Yin (1996:4), pada semua situasi kebutuhan akan studi kasus melewati keinginan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa nyata. Kerangka kerja holistik merupakan salah satu karakteristik yang sangat mendasar bagi peneliti kualitatif. Selain itu, karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam proposal sebelum peneliti terjun dan menggali permasalahan di lapangan, maka jenis strategi penelitian kasus ini secara lebih khusus bisa disebut sebagai studi kasus terpancang *embedded study research*. Penelitian ini memilih studi kasus terpancang, dengan tujuan agar peneliti dapat melihat partisipasi perempuan lebih tajam, khususnya dalam kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif, sedangkan sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini ada tiga sumber yaitu :

- a. Nara Sumber, yang terdiri dari stakeholder PPK mulai dari tingkat Kecamatan sampai Desa, UPK, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Tim Verifikasi, Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok, Anggota Kelompok dan beberapa warga masyarakat yang diteliti.
- b. Tempat dan peristiwa / aktivitas beberapa kejadian khusus yang terjadi pada masyarakat maupun kegiatan-kegiatan kelompok atau dusun. Kegiatan atau aktivitas yang terdiri dari kegiatan partisipasi perempuan disetiap tahapan

perencanaan PPK mulai di tingkat kecamatan sampai di kelompok, saat pelaksanaan kegiatan UEP dan kegiatan pelestarian UEP.

- c. Arsip dan dokumen resmi mengenai pelaksanaan kegiatan partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK.

i. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara Mendalam

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang, pada informan yang sama (Sutopo, 2002 : 59). Tujuan wawancara mendalam ini adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktifitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya .

Interview merupakan metode yang biasa di kenal dengan wawancara yang dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab dan bersifat terbuka yang membuka kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pandangan, persepsi serta pendapatnya. Wawancara dilakukan dengan pembicaraan informal dan pendekatan kepada informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, sikap dan pandangan masyarakat terhadap proses partisipasi perempuan pada kegiatan PPK yang telah mereka lakukan.

b. Observasi Langsung

Observasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan sengaja melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala obyek yang diteliti secara langsung. Teknik observasi dipergunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, gambar atau rekaman.

Observasi langsung ini dilaksanakan secara formal dan informal, Observasi formal meliputi pengamatan secara formal meliputi pengamatan terhadap pertemuan-pertemuan di kelompok, tingkat dusun, tingkat desa dan kegiatan pemanfaat dalam partisipasi kegiatan UEP, sedangkan observasi informal dilakukan melalui pengamatan terhadap kondisi karakteristik masyarakat, pelestarian kegiatan UEP. Observasi dalam penelitian kualitatif sering disebut observasi berperan pasif (Spadley dalam Sutopo, 2002:185).

3. Mencatat Dokumen

Menurut Yin (1996), *Content analysis* dimaksudkan bahwa peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga maknanya yang tersirat, sehingga peneliti harus bersikap kritis dan teliti. Proses pencatatan data tersebut dilakukan dengan menghubungi pelaku pengarsipan data, langkah berikutnya setelah data tersaji adalah memahami data, mempelajari dan mencatat semua data yang diperlukan ke dalam buku yang telah dipersiapkan (Kuntjoroningrat, 1993 : 272). Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat pada kegiatan mulai dari MAD I, Musdes I, Musyawarah Dusun,

Musyawarah Kelompok, Musyawarah Khusus perempuan, Musdes II, MAD II, MAD III, dan Musdes III.

d. Kuesioner

Kuisisioner yang dilakukan ada dua cara yaitu tertulis dan lisan (yang tidak bisa menulis) dengan pertanyaan yang memungkinkan mereka bisa menjawab secara bebas menurut pendapat dan istilah yang mereka pahami. Penggunaan kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilapangan dengan kajian yang lebih mendalam. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpul data dalam penelitian. Daftar pertanyaan selalu bersifat terbuka artinya informan diberi ruang yang bebas dan terbuka terhadap pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan mereka didorong untuk menjawab dengan penuh kenyamanan dan tidak ada beban sedikitpun dalam jawaban mereka.

E. Teknik Sampling (Cuplikan)

Fokus teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Teknik cuplikan yang digunakan bukanlah cuplikan statistik yang biasa dikenal sebagai ” *probability sampling*”. Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan teknik sampling yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teori yang digunakan, keinginan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya dan lain-lain. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat ” *purposive sampling*”, dimana peneliti cenderung

memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara detail dan dapat dipercaya. Untuk menjadi sumber data yang mantap, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Patton dalam Sutopo, 2002 : 56). Teknik cuplikan ini dengan berbagai alasannya sering juga dinyatakan sebagai *Criterion-based selection* daripada *probability sampling* (Goetz & Le Compte dalam Sutopo, 2002:56).

F. Validitas Data

Validitas ini merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian. Dalam menjamin validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas (kesahihan) data penelitian. Cara tersebut antara lain berupa teknik triangulasi dan dan review informan (Sutopo, 2002:78).

Teknik pengembangan validitas data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi. Menurut Patton dalam Sutopo (2002:79), ada empat macam jenis triangulasi yaitu

1. Triangulasi data

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis beberapa sumber data yang berbeda, misalnya mengenai kegiatan program digali dari sumber data yang berupa informan, arsip dan peristiwa, demikian juga data kegiatan keterlibatan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa, apabila informan sama maka menunjukkan bahwa data tersebut valid, bila masih ada perbedaan informasi maka peneliti melakukan pengecekan lagi kepada nara sumber yang lain.

2. Trianggulasi peneliti (*investigator triangulation*)

Hal ini dilakukan untuk mendiskusikan data yang diperoleh dengan beberapa anggota atau pelaku lainnya yang terlibat maupun yang tidak terlibat tetapi mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Trianggulasi metodologis (*mythodological triangulation*)

Metode ini dilakukan peneliti dengan data atau informasi sejenis yang digali dari para nara sumber yang sama akan diuji dengan menggunakan teknik dan metode pengumpulan data yang berbeda.

4. Trianggulasi teoritis (*theoretical triangulation*)

Dilakukan dengan menggunakan perpektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan 2 (dua) validitas data, yaitu: (1) trianggulasi data / sumber (*data triangulation*) yaitu mengumpulkan data yang sejenis dari berbagai sumber data yang berupa informan, arsip dan peristiwa, dan (2) trianggulasi teoritis (*theoretical data triangulation*) yaitu menggunakan perpektif lebih dari satu permasalahan yang dikaji. Trianggulasi data diperoleh dengan mengumpulkan jenis data yang sama dengan menggunakan beberapa sumber data yang berbeda, bisa berupa informan, peristiwa, kondisi lokasi, catatan, arsip/dokumen, aktivitas dan data yang dimulai dari proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian pada saat partisipasi perempuan, Sedangkan trianggulasi teoritis diperoleh dengan menggunakan beberapa teori untuk mengamati dan

membahas suatu peristiwa yang dilihat dari beberapa perspektif teori yang berbeda.

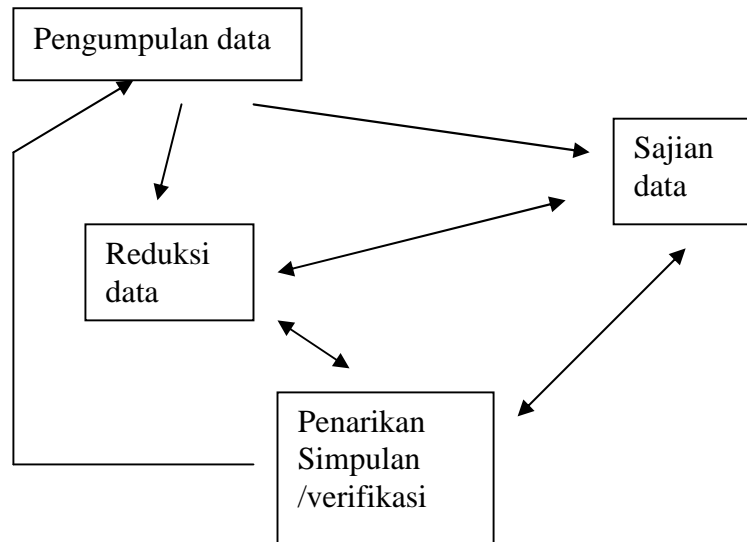
H. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, (Patton dalam Moleong, 1996 : 103), sedangkan Bogdan dan Biklen (1982 :145), mengemukakan analisis data meliputi kegiatan mengerjakan data, menata dan membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang dilaporkan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus (*site analysis*). Proses penelitian kualitatif ini analisisnya secara keseluruhan bersifat ” *empirico inductive* ”, yang sangat berbeda dengan proses analisis dalam penelitian kualitatif yang bersifat ” *hypothetico deductive* ” dengan mengajukan hipotesa penelitian (Kirk & Miller dalam Sutopo, 2002 : 110).

Miles & Huberman dalam Sutopo (2002 : 91) mengemukakan tiga komponen utama dalam penelitian kualitatif yaitu, (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan simpulan serta verifikasi. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi, tak bisa dipisahkan dari kegiatan pengumpulan data, oleh karena itu sering dinyatakan bahwa proses analisis dilakukan dilapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya (Sutopo,2002:94)

Secara singkat proses analisis interaksi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Proses Analisis Interaktif (Sutopo, 2002 : 96)

I. Prosedur Penelitian

1. Persiapan.

- a) Mengurus perijinan penelitian : Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam
- b) Menentukan Sampel Responden (TPK) : berkonsultasi dengan Camat, kemudian memilih kelompok yang diteliti.
- c) Meninjau kelompok yang akan diteliti dan sosialisasi kegiatan penelitian sampai selesai dan berhasil.
- d) Menyusun persiapan penelitian dan pengembangan pedoman pengumpulan data (daftar pertanyaan dan petunjuk observasi).

2. Pengumpulan Data

- a) Mengumpulkan data dilokasi studi dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen.
- b) Melakukan review dan pembahasan data yang telah terkumpul.
- c) Menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang paling cepat.
- d) Mengatur data untuk kepentingan analisis.

3. Analisis Data

- a) Melakukan analisis awal, bila unit data kelompok sudah cukup lengkap dan valid.
- b) Mengembangkan bentuk sajian data dengan menyusun matrik bagi kepentingan analisis lanjut.
- c) Melakukan analisis kelompok, dan mengembangkan matrik study kasus.
- d) Melakukan verifikasi, pengayaan dan pendalaman data.
- e) Melakukan analisis data kelompok.
- f) Merumuskan simpulan akhir sebagai bagian dari pengembangan saran dalam laporan akhir penelitian.

4. Penyusunan Laporan

- a) Penyusunan laporan secara sistematis
- b) Review laporan dengan cara mengundang orang-orang yang cukup memahami penelitian untuk mendiskusikan laporan yang telah disusun sementara.
- c) Perbaiki laporan, dan disusun sebagai laporan akhir penelitian.

BAB IV

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Sajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Wonosalam adalah salah satu Kecamatan lokasi penerima dana PPK di wilayah Kabupaten Demak. Jenis kegiatan yang diusulkan dari Musyawarah Khusus Perempuan di masing-masing Desa adalah usulan SPP dan UEP, kegiatan ekonomi (UEP dan SPP) sampai sekarang masih berjalan baik walaupun pada tahun 2006 sampai tahun 2008 sudah tidak mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) seperti Kecamatan-Kecamatan yang pernah mendapat PPK. Jarak tempuh Kecamatan dari ibukota Kabupaten Demak kurang lebih 6 km atau 10 menit dengan mobil atau sepeda motor. Kecamatan Wonosalam mempunyai luas tanah 5.783,04 Ha, yang terdiri dari tanah sawah 3.780,62 Ha (65,37 %), pekarangan/bangunan 1.218,23 Ha (21,07 %), tegalan/kebun 538,25 Ha (9,31 %), lainnya (sungai, Jalan, dll) 245,94 Ha (4,30 %). Dengan melihat kondisi diatas menunjukkan wilayah kecamatan Wonosalam secara geografis terdiri dari lahan yang produktif.

Kecamatan Wonosalam memiliki ketinggian 0-20 m diatas permukaan laut dengan kemiringan dimulai dari 0-50% dataran, Kecamatan Wonosalam memiliki 2 musim yang bergantian sepanjang tahun yaitu penghujan dan kemarau. Temperatur di Kecamatan Wonosalam berkisar antara 26-32°C dengan kelembaban udara 53-65%. Banyaknya hari hujan tertinggi terjadi

pada bulan Nopember dengan curah hujan 442 mm dan terendah di bulan September dengan curah hujan rata-rata 0 mm, sedangkan curah hujan rata-rata di Kecamatan Wonosalam adalah 2245 mm/tahun. Berdasarkan intensitas curah hujan dan temperatur yang dimiliki, maka berpengaruh terhadap aktivitas penduduk Kecamatan Wonosalam yaitu bergerak disektor pertanian seperti Padi dan Palawija (Kedelai, Jagung, Kacang Tanah dan Kacang Hijau), sedangkan untuk kebutuhan air pertanian, masyarakat memanfaatkan saluran irigasi Kali Jajar yang sumber airnya dari waduk Kedung Ombo.

Kecamatan Wonosalam terdiri dari 21 Desa dengan jumlah penduduk 69.811 jiwa terdiri dari 18.146 Kepala Keluarga (KK), Laki-laki 34.411 jiwa dan Perempuan 35.400 jiwa. Jumlah KK Miskin (Prasejahtera) pada tahun 2007 menurut BKKBN di Kecamatan Wonosalam sebesar 10.398 KK (51,46 %). Pada tahun 2003 sebelum ada PPK jumlah KK miskin di Kecamatan Wonosalam sebesar 11.273 KK (62.33%) dengan adanya PPK di Kecamatan Wonosalam pada tahun 2003 sampai 2005, jumlah KK miskin berangsur-angsur mulai ada penurunan sebesar 10.88% menjadi 10.398 KK, dilihat dari penurunan angka kemiskinan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya PPK bisa mengurangi angka kemiskinan walaupun belum maksimal. Secara rinci Penduduk Kecamatan Wonosalam menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 : Jumlah Penduduk menurut usia dan Jenis Kelamin Kelompok Umur Di Kecamatan Wonosalam, 2007

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	3.651	3.473	6.002
5-9	3.425	3.582	10.714
10-14	3.780	3.700	7.672
15-19	3.631	4.769	7.999
20-24	3.391	3.460	6.436
25-29	2.942	2.860	5.747
30-34	2.843	2.943	5.735
35-39	2.629	2.583	4.168
40-44	2.146	2.205	4.041
45-49	1.707	1.697	3.375
50-54	1.182	1.184	2.366
55-59	840	993	1.833
60-64	915	1.177	2.092
65+	1.329	1.766	3.095
Jumlah	34.411	35.400	69.811

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2007

Dengan data di atas dapat diketahui tingkat usia produktif 20-29 tahun jumlahnya semakin menurun, hal ini disebabkan karena pada usia produktif tersebut penduduk Kecamatan Wonosalam banyak yang keluar dan bekerja diluar daerah untuk meningkatkan pendapatan : antara lain mereka bekerja ke : Semarang, Jakarta, Surabaya, Jambi, Kalimantan dan sebagian menjadi TKW / TKI ke Mekah.

2. Potensi Sosial, Budaya dan Ekonomi

2.1. Sosial dan Budaya

Budaya merupakan bentuk perilaku yang telah dibakukan dan diakui masyarakat sebagai simbol ciri khas mereka, sedangkan kondisi sosial merupakan keadaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari warga masyarakat dan berhubungan dengan tingkah laku yang menyangkut orang lain. Kondisi sosial dan Budaya saling berhubungan dan berproses dalam perilaku masyarakat. Bentuk –bentuk kegiatan sosial yang masih berjalan di Desa adalah kegiatan gotong-royong, masyarakat saling membantu apabila tetangga punya hajat, kesusahan, dan lain-lainnya, sedangkan budaya yang masih berjalan di masyarakat Kecamatan Wonosalam adalah kegiatan sedekah Desa, selamat / tasyakuran hajatan, selamat untuk orang meninggal, dan kebiasaan silaturahmi pada hari raya idul fitri (saling kunjung ke rumah untuk minta maaf) dan kegiatan keagamaan yang berupa Samrohan, tahlilan dan kegiatan keagamaan lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Kecamatan Wonosalam, kondisi sosial dan budaya masih sangat kental, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari berupa kerjasama, gotong-royong, kerukunan dan kesetiakawanan sosial masih sangat tinggi. Potensi sosial dan budaya ini yang akan menjadi modal dalam keberhasilan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan karena tanpa adanya dukungan masyarakat semua program yang ada tidak akan berhasil.

Sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat Kecamatan Wonosalam selain menguntungkan masyarakat juga dapat merugikan seperti budaya masyarakat desa yang selalu *nrimo ing pandum* atau selalu menerima

kenyataan hidup dan tidak berusaha mengubah kehidupan yang dihadapi, hal ini akan merugikan masyarakat karena akan tertinggal dan kehidupannya akan selalu kekurangan, budaya inilah yang perlu tinggalkan masyarakat agar kehidupannya bisa tercukupi harus berusaha mengubah pola hidup yang semula selalu *nrimo*. Selain itu masyarakat di Kecamatan Wonosalam khususnya petani yang hanya mempunyai lahan sempit atau buruh tani mempunyai budaya untuk memenuhi kebutuhan dalam *menggarap* lahan pertaniannya biasanya meminjam pada seseorang yang memang menyediakan uang untuk dipinjamkan ke petani dengan sisten *ijon* yaitu dengan cara petani meminjam uang atau kebutuhan yang diperlukan untuk bertani (bibit, pupuk, biaya garap) yang nantinya dikembalikan dalam bentuk hasil panen (padi,kacang hijau) tetapi harga sudah ditentukan oleh pemberi pinjaman, dengan demikian si pemberi pinjaman akan untung dua kali yaitu dari harga benih atau pupuk dan harga padi yang diperoleh dari peminjam, sehingga petani yang tidak mempunyai modal sendiri akan semakin berkurang pendapatannya dan bagi pemilik dana akan memperoleh keuntungan semakin besar.

2.2. Ekonomi (Pendidikan, Pendapatan dan Pekerjaan)

Jumlah penduduk Kecamatan Wonosalam menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 7 : Penduduk menurut Pendidikan yang ditamatkan Di Kecamatan Wonosalam, 2007

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
----	------------	--------------------	----------------

1	Tamat Akademi / Sarjana	994	1,42
2	Tamat SLTA	6.445	9,23
3	Tamat SLTP	9.036	12,94
4	Tamat SD	26.117	37,41
5	Tidak Tamat SD	5.574	7,98
6	Belum Tamat SD	8.182	11,72
7	Tidak Sekolah	6.339	9,08
8	Belum sekolah	7.124	10,22
Jumlah		69.811	100

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2007

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Wonosalam rata-rata tamatan SD yaitu sebanyak 34.36 %. Dengan kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pola pikir dalam masyarakat dan kehidupan sosial ekonomi, dengan pendidikan yang rendah pola pikir masyarakat akan tertinggal dan kehidupan sosial ekonomipun bisa dipastikan akan rendah, hal ini karena masyarakat dengan pendidikan rendah tidak akan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga akan mempengaruhi pendapat yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan pendidikan rendah rata-rata masyarakat hanya bisa bekerja sebagai buruh, kuli yang penghasilan perbulan masih dibawah upah minimum regional (UMR).

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Wonosalam sebagian besar sebagai petani dan buruh tani ini dapat dilihat dari luas tanah 5.783,04 Ha yang terdiri dari tanah sawah 3.780,62 Ha dan tanah kering 2.002,42 Ha, dengan perbandingan yang lebih banyak luas tanah sawah yaitu sebesar 65,37 % dapat dipastikan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Wonosalam

sebagai petani dan buruh tani dengan rata-rata kepemilikan tanah masyarakat di Kecamatan Wonosalam adalah 0,25 H. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat berguna untuk mengetahui tingkat dan jenis pekerjaan penduduk sehingga didapatkan tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk. Secara pasti mata pencaharian Penduduk di Kecamatan Wonosalam dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8: Penduduk menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Wonosalam, 2007

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Petani Sendiri	11.368	16,28
2	Buruh Tani	10.141	14,53
3	Nelayan	4	0
4	Pengusaha	463	0,66
5	Buruh Industri	1.693	2,43
6	Buruh Bangunan	3.367	4,82
7	Pedagang	3.826	5,48
8	Usaha Angkutan	1.087	1,56
9	Pegawai Negeri/ ABRI	1.277	1,83
10	Pensiunan	188	0,27
11	Lainnya	3.488	4,99
12	Tidak dan belum bekerja	33.909	47,15
Jumlah		69.811	100

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2007

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Wonosalam sebagian besar sebagai Petani dan Buruh Tani yaitu 30,81% . Sisten pertanian yang dilakukan dengan sistem tanam padi dua kali dan satu kali polowijo , Permasalahan yang sering dihadapi para petani maupun buruh tani adalah masalah permodalan untuk biaya tanam.

Untuk mengerjakan sawah biasanya petani meminjam kepada orang yang memang menyediakan pinjaman dengan cara pembayaran menggunakan hasil panen (padi) setelah panen tetapi dengan harga yang sudah disepakati diawal pada waktu pinjam (sistem ijon) biasanya harga ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman. Dengan demikian pendapatan petani maupun buruh tani yang tidak mempunyai modal sendiri akan sangat berkurang, kebiasaan ini sudah berlangsung lama kadang memang dimanfaatkan oleh para pemilik dana sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar, walaupun sangat merugikan para petani dan buruh tani.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap PPK

Persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka (Robin, 2002 : 31).

Margono dalam Mardikanto, (1996:115) mengemukakan bahwa *kosmopolitnes* yang dicirikan oleh pemanfaatan media masa, akan membantu kita memahami tingkah laku diri kita dan orang lain. Biran, (1978:28) mengemukakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh karakteristik rangsangan, situasi yang melatari kehadiran obyek, dan karakteristik pribadi sebagai faktor penentu yang paling kuat. Tubbs and Moss, (1996 : 40, 70–78). Khusus yang berkaitan dengan karakteristik pribadi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi :

- (1). Kepribadian, kaitanya dengan penilaian terhadap sesuatu
- (2). Ramalan, Tentang apa yang akan terjadi

- (3). Aksentuasi, tentang kondisi minimal yang dapat diterima
- (4). Kesan terhadap pengalaman yang pernah dialami
- (5). Konsistensi, untuk mempertahankan kondisi yang dialami / diinginkan
- (6). Stereotip, atau citra.

Salah satu prinsip PPK adalah keterlibatan perempuan sehingga dalam perencanaan kaum perempuan diberi kesempatan untuk menentukan usulan dari perempuan, karena inilah persepsi masyarakat khususnya perempuan terhadap PPK merupakan landasan utama bagi timbulnya kesediaan untuk terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan PPK. Adanya PPK di Kecamatan Wonosalam sangat didukung baik oleh semua warga khususnya perempuan, masyarakat perempuan menilai dan mengartikan pentingnya keterlibatan dalam partisipasi sesuai dengan peran dan kebutuhan yang memang merupakan kebutuhan penting bagi perempuan.

4. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan

4.1. Program Pengembangan Kecamatan

Program Pengembangan Kecamatan secara umum mempunyai tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai

kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan Khusus Program Pengembangan Kecamatan adalah :

- (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian kegiatan.
- (2) Meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- (3) Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan.
- (4) Mendorong kelembagaan sistem pembangunan partisipatoris.
- (5) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sasaran PPK adalah kelompok penduduk miskin perdesaan pada kecamatan miskin. Kecamatan lokasi PPK ditentukan oleh Tim Koordinasi PPK Pusat dengan dikoordinasikan Pemerintah Daerah.

Sumber dana PPK berasal dari Pemerintah (APBN, APBD), Pinjaman Luar Negeri atau Bank Dunia dan Masyarakat. Alokasi bantuan ditetapkan antara Rp. 500 juta sampai Rp. 1 Milyar per Kecamatan berdasarkan jumlah Penduduk..

Tabel 9 : Jumlah Pendanaan PPK

Lokasi Kecamatan	Jml Penduduk / Kec.	Alokasi Dana (Rp)
Jawa	> 50.000 Jiwa	1 Milyar
	25.000 – 50.000 Jiwa	750 Juta
	< 25.000 Jiwa	500 Juta
Luar Jawa	> 25.000 Jiwa	1 Milyar

	15.000 – 25.000 Jiwa	750 Juta
	< 15.000 Jiwa	500 Juta

Sumber : PTO PPK, 2002

PPK merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, Masyarakat diberi kebebasan menentukan kegiatan yang akan diajukan atas dasar kesepakatan dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar : Keberpihakan kepada orang miskin, Transparansi, Partisipasi, Desentralisasi dan Kompetisi Sehat tanpa meninggalkan *negatif lish* (Daftar Larangan) yang meliputi :

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
- 2) Pembangunan / rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah.
- 3) Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan – bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dll)
- 4) Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton & perlengkapannya.
- 5) Pembiayaan gaji pegawai negeri.
- 6) Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak dibawah usia kerja.
- 7) Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut.
- 8) Kegiatan pengolahan tambang / pengambilan terumbu karang.
- 9) Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang besarnya lebih dari 50 Ha.

4.2. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wonosalam

Kecamatan Wonosalam merupakan Lokasi Pasca PPK di Kabupaten Demak yang hanya didanai selama tiga Tahun (2003 sampai 2005)., kegiatan ekonomi khususnya Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sampai sekarang masih berjalan baik dan tingkat kesehatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) masuk dalam kategori sehat.

Pada Pelaksanaan PPK harus melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan pada alur kegiatan yaitu :

Perencanaan :

- 1) Musyawarah Antar Desa I (MAD I)
- 2) MAD I ini bertujuan mengadakan sosialisasi PPK di Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari semua Desa se Kecamatan Wonosalam.

- 3) Musyawarah Desa I (MD I)

MD I bertujuan untuk mengadakan sosialisasi PPK, pemilihan Tim pengelola Kegiatan (TPK) dan Pemilihan Fasilitator Desa (FD) yang nanti bertugas untuk mensosialisasikan PPK ke Dusun-dusun atau Kelompok-kelompok yang ada di Desa, MD I diadakan di seluruh desa se Kecamatan Wonosalam.

- 4) Musdus (Musyawarah dusun / Kelompok)

Musyawarah ini bertujuan untuk mensosialisasikan PPK kepada Masyarakat secara luas melalui kelompok- kelompok atau pertemuan –

pertemuan ditingkat Dusun, dan mengadakan penggalian gagasan / usulan yang akan diajukan melalui PPK, Musyawarah ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok khusus perempuan dan kelompok campuran sehingga akan muncul usulan khusus dari perempuan dan dari campuran.

5) Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)

Musyawarah khusus Perempuan merupakan tindak lanjut dari Musyawarah kelompok – kelompok perempuan, Musyawarah ini dihadiri dari wakil-wakil kelompok perempuan yang ada di Desa dengan tujuan menetapkan 2 usulan dari MKP yang terdiri dari 1 usulan SPP dan 1 usulan lain (sarana prasarana, Pendidikan, Kesehatan dan UEP), memilih 3 wakil perempuan yang akan ikut dalam MAD II di Tingkat Kecamatan. Penetapan usulan dilakukan dengan musyawarah mufakat yang diputuskan dengan melihat usulan yang memang dibutuhkan perempuan dan tingkat kemendesakan usulan.

6) Musyawarah Desa II (MD II)

Musyawarah Desa II merupakan tindak lanjut dari MKP yang dihadiri dari wakil-wakil masyarakat laki-laki dan perempuan, Tujuan MDII adalah mensyahkan semua keputusan MKP, menetapkan 1 usulan (sarana prasarana, Pendidikan, kesehatan, UEP) melalui musyawarah mufakat dengan melihat tingkat kebutuhan dan kemendesakannya, sehingga akan ditetapkannya 3 usulan (2 dari MKP dan 1 dari MD II), kemudian akan

ditetapkannya 6 orang wakil yang akan mengikuti Musyawarah Antar Desa II di tingkat Kecamatan.

7) Verifikasi Kegiatan

Verifikasi Kegiatan bertujuan untuk mencocokkan usulan dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya, Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan keahlian atau kemampuan seseorang sesuai dengan usulan yang diajukan dengan anggota 7 – 10 orang.

8) Musyawarah Antar Desa II (MAD II)

MAD II dihadiri dari wakil-wakil semua desa (6 orang per desa) se Kecamatan Wonosalam dan dilaksanakan di tingkat Kecamatan, Tujuan Musyawarah ini adalah memprioritaskan atau meranking semua usulan yang sudah dinyatakan layak oleh Tim verifikasi dengan kriteria-kriteria yang sudah disepakati dalam MAD I sehingga akan diperoleh ranking usulan.

9) Pembuatan Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penyusunan RAB dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing usulan sesuai ranking yang sudah disepakati di MAD II, ranking yang sudah tersusun akan berhenti apabila pendanaan sudah habis sehingga belum tentu semua ranking bisa didanai semua.

10) Musyawarah Antar desa III (MAD III)

MAD III bertujuan menetapkan usulan yang didanai PPK berdasarkan ranking yang sudah ditetapkan pada MAD II

11) Musyawarah Desa III (MD III)

Musyawarah ini bertujuan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usulan-usulan desa yang didanai PPK, kegiatan MD III ini juga dilakukan untuk desa yang tidak didanai dengan demikian apapun hasilnya dalam MAD III masyarakat harus mengetahui dan apabila tidak didanai masyarakat bisa mengetahui alasan – alasan atau kekurangan-kekurangan desanya sehingga pada tahun berikutnya bisa memperbaiki, dan untuk desa-desa yang usulannya didanai langsung mempersiapkan pelaksanaan.

Pelaksanaan :

1). Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan dimulai dari MD III dan dilanjutkan rapat Tim Pelaksana Kegiatan untuk menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan.

2). Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh TPK dengan dimonitoring oleh Tim Pengawas yang sudah dibentuk di desa. Dalam pelaksanaan sarana Prasarana proses pencairan dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilakukan sesuai tahap kemajuan kegiatan dilapangan, tetapi untuk kegiatan SPP dan UEP dilakukan langsung 100% pencairan dari UPK kemudian TPK mencairkan langsung ke kelompok dan peminjam. Dalam proses pelaksanaan ini setiap pencairan selalu dilakukan Musyawarah Pertanggung Jawaban kepada Masyarakat paling sedikit 3 kali dan setelah kegiatan selesai dilakukan Musyawarah Serah Terima kepada Masyarakat yang kemudian harus dipelihara atau dilestarikan oleh masyarakat dengan dana swadaya dan untuk kegiatan SPP maupun UEP harus ada

pengembalian secara rutin sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati ke UPK.

Pelestarian :

Untuk kegiatan yang berupa sarana prasarana pelestarian yang dilakukan adalah dengan cara pemeliharaan dengan biaya swadaya sehingga sarana yang dibangun dapat bermanfaat dan berfungsi baik, kemudian untuk kegiatan SPP dan UEP pelestarian yang dilakukan adalah pengembalian ke UPK kemudian setiap beberapa bulan sekali akan digulirkan ke kelompok – kelompok dari desa se Kecamatan Wonosalam yang mengajukan perguliran.

5. Partisipasi Masyarakat

5.1.Lingkup Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan. Dalam kegiatan PPK lingkup partisipasi yang digunakan adalah pendapat Yadav (UNAPDI, 1980 dalam Totok Marikanto 2003 : 93), yang mencakup :

- a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam PPK Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini di Kecamatan Wonosalam penentuan usulan mulai dari MD I, pertemuan tingkat kelompok-kelompok maupun dusun, kemudian dalam MKP dan MD II, masyarakat mulai terlibat dalam memutuskan usulan kegiatan yang

diajukan ke PPK, memutuskan wakil-wakil yang menjadi wakil desa dan pelaku-pelaku yang akan melaksanakan PPK di tingkat Desa.

b) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Wonosalam dalam pelaksanaan PPK adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang berupa sumbangan swadaya yang diberikan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan PPK baik yang berupa sumbangan uang, material maupun tenaga. Dalam pelaksanaan kegiatan PPK merupakan kegiatan yang berbentuk swakelola semua pelaksanaan direncanakan dan dikerjakan oleh masyarakat sendiri, dengan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat merasa memiliki sehingga hasil kegiatan yang dilaksanakan mempunyai kualitas baik, selain itu masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dalam pemeliharannya.

c) Partisipasi dalam Pengendalian

Dalam Kegiatan PPK kegiatan pengendalian yang dilakukan meliputi pelaporan, pemantauan, pemeriksaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengaduan dan penanganan masalah. Untuk melaksanakan tugas pengendalian tersebut masyarakat belum banyak terlibat karena masyarakat merasa belum terbiasa, masih *ewuh pekewuh* apabila dalam pelaksanaan ikut mengawasi atau mengevaluasi, tetapi dalam pelaksanaan telah dibentuk Tim Monitoring (Tim 18) yang bekerja secara sukarela dan

terdiri dari : Tim 6 (beranggotakan 6 orang) bertugas memeriksa atau memantau administrasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), pembukuan TPK, pemanfaatan papan informasi. Tim 5 (beranggotakan 5 Orang) bertugas memeriksa dan memantau keuangan TPK baik penerimaan dari UPK maupun pembayaran ke Suplaiyer atau Toko. Tim 4 (beranggotakan 4 orang) bertugas membantu TPK dalam pengadaan material atau peralatan yang dibutuhkan sampai ke pengecekan harga di toko-toko. Tim 3 (beranggotakan 3 orang) Tugas Tim 3 adalah memantau atau memeriksa kualitas dan kuantitas semua material yang dibeli oleh TPK. Dengan demikian pengendalian benar-benar dilakukan mulai dari administrasi, keuangan, pengadaan material dan kualitas kegiatan. Tim Monitoring akan melaporkan hasil pemeriksaan / monitoring kepada masyarakat pada setiap musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima. Walaupun sudah dibentuk Tim Monitoring masyarakat namun pelaku-pelaku yang sudah dibentuk dalam melaksanakan tugasnya masih belum maksimal, hal ini karena budaya yang belum terbiasa, masih merasa sungkan apabila akan melaporkan bila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai.

d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Dalam kegiatan PPK khususnya kegiatan UEP partisipasi pemanfaatan hasil kegiatan merupakan hal yang terpenting karena sesuai dengan tujuan PPK sendiri yaitu mengurangi angka kemiskinan dan salah satu prinsip PPK tentang keterlibatan perempuan, sehingga dengan adanya pemanfaatan UEP bagi masyarakat khususnya kelompok perempuan dapat

meningkatkan omset pendapatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan juga mendorong tingkat pengembalian UEP ke UPK sehingga akan memberi kesempatan kelompok lain untuk ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan di Kecamatan Wonosalam sangat bermanfaat karena dengan adanya hasil kegiatan dari PPK yang berupa sarana prasarana dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, sedangkan untuk kegiatan UEP sangat membantu masyarakat khususnya perempuan dalam membantu pendapatan keluarga.

5.2.Bentuk – Bentuk Kegiatan Partisipasi

Dalam Kegiatan PPK bentuk –bentuk kegiatan partisipasi yang digunakan adalah menurut pendapat Dusselodrop (Totok Mardikanto, 2003: 92-93) yang meliputi :

a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat

Dalam kondisi masyarakat di Kecamatan Wonosalam yang sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat sudah banyak terbentuk dan mempunyai kegiatan yang bermacam-macam, kelompok masyarakat yang sudah berjalan di desa meliputi : kelompok RT, RW, kelompok PKK, kelompok arisan, kelompok pengajian, yasinan, kelompok tani, kelompok karang taruna dan lain-lain. Kelompok ini merupakan wadah kerjasama, organisasi dan wadah kegiatan. Dalam Kegiatan PPK mulai dari sosialisasi dan perencanaan sudah melibatkan kelompok-kelompok yang ada di desa-desa, dalam kegiatan sosialisasi fasilitator desa memasuki kelompok-

kelompok yang memang sudah ada pertemuan rutin dengan mensosialisasikan PPK kepada masyarakat melalui pertemuan yang sudah ada, kemudian melakukan penggalian gagasan atau usulan-usulan dari kelompok yang anggotanya perempuan nantinya akan dibahas didalam Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), sedang untuk kelompok laki-laki atau campuran usulannya akan dibahas dalam Musyawarah desa II (MD II). Selain membahas usulan yang akan diajukan ke MKP maupun MD II juga dibahas wakil-wakil dari masing kelompok yang akan mengikuti MKP maupun MD II.

b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok

Pada pelaksanaan PPK di Kecamatan Wonosalam melalui kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dan sudah berjalan biasanya mengadakan pertemuan rutin yang sudah dijalankan baik itu mingguan, bulanan maupun selapanan. Dalam kegiatan rutin yang mereka lakukan biasanya anggota kelompok terlibat dalam pertemuan yang diadakan dengan cara mendengarkan, menyimak, terkadang memberikan saran atau masukan sebagai wujud kebersamaan. Pada kegiatan PPK dalam proses penggalian gagasan kelompok masyarakat diajarkan untuk memberikan masukan, usulan kemudian menentukan melalui diskusi kelompok usulan kelompok yang diusulkan ke MKP maupun MD II, selain itu anggota kelompok juga musyawarah untuk menentukan wakil-wakil kelompok yang akan mengikuti MKP dan MD II di tingkat Desa, dengan demikian masyarakat

sudah memulai proses belajar menentukan usulan dengan diskusi kelompok.

- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.

Masyarakat di Kecamatan Wonosalam sebenarnya sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di Desa seperti yang sudah berjalan di kabupaten Demak rata-rata para ibu-ibu sudah tergabung pada organisasi keagamaan (Fatayat, Muslimat dll), dalam kegiatan PPK Masyarakat diajari untuk menjadi pelaku seperti Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Fasilitator Desa (FD), Kader Teknik (KT), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Monitoring dan Tim Pemelihara. Dengan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku PPK bisa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPK mulai dari perencanaan sampai pelestarian kegiatan.

- d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat

Sumberdaya terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, Sumberdaya alam merupakan potensi-potensi yang dimiliki alam / lokasi-lokasi daerah, sedangkan sumberdaya manusia merupakan perilaku dan pola pemikiran. Dalam kegiatan PPK wujud sumberdaya manusia berupa pikiran dan tenaga yang disumbangkan sebagai swadaya untuk menunjang kegiatan, sedangkan sumberdaya alam merupakan potensi-potensi yang ada di desa yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan PPK, sumberdaya masyarakat yang sudah disumbangkan pada kegiatan

PPK di Kecamatan Wonosalam meliputi sumber daya manusia dengan gotong royong, sumbangan konsumsi dari masyarakat untuk menunjang kegiatan PPK.

e) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan

Dalam perencanaan PPK khususnya dalam penentuan usulan kegiatan masyarakat selalu terlibat mulai dari musyawarah dusun / kelompok, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Desa II, disini masyarakat secara umum ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga diperoleh usulan kegiatan yang memang merupakan kebutuhan masyarakat setempat.

f) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Masyarakat selain terlibat dalam kegiatan PPK mulai dari perencanaan sampai pelestarian juga ikut memanfaatkan hasil kegiatan yaitu untuk kegiatan sarana/prasarana masyarakat juga memanfaatkan sebagai pekerja sehingga mendapat upah dari pekerjaan yang dilaksanakan, menggunakan atau memanfaatkan sarana yang dibangun (jalan, jembatan dll), sedangkan untuk kegiatan SPP dan UEP banyak kelompok perempuan yang ikut meminjam untuk menambah modal usahanya.

5.3. Tingkat Partisipasi

5.3.1. Tingkat Partisipasi Perempuan pada program sebelum PPK

Secara umum di Kecamatan Wonosalam kegiatan – kegiatan yang melibatkan perempuan biasanya hanya dapat dilihat pada kegiatan yang memang rutin menjadi kegiatan khusus perempuan seperti kegiatan

Program Kesejahteraan Keluarga (KK) dan kegiatan – kegiatan yang berupa kegiatan keagamaan seperti Yasinan, Tahlilan dan Arisan, sedangkan untuk Program –Program Pembangunan di Desa yang selama ini sudah berjalan biasanya tidak pernah melibatkan perempuan, sehingga perempuan tidak pernah tahu program apa saja yang sudah ada di Desa. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang sudah berjalan di Kecamatan Wonosalam pengertian masyarakat bahwa perempuan hanya sebagai *konco wingking* sehingga tidak perlu berperan aktif dalam pembangunan fisik di masyarakat, perempuan sendiri merasa *rikuh* apabila harus berkumpul dengan Laki-laki apalagi harus menyampaikan pendapat. Hasil wawancara ada beberapa orang perempuan tentang partisipasi perempuan terhadap program pembangunan atau program lain sebelum ada PPK sebagai berikut “ *Riyen sak derenge enten PPK tiyang estri mboten pernah nderek-nderek kempalan, meleh-meleh ken usul kados PPK, paleng-paleng ngertose ngeh deso angсал bantuan kagem nopo, biasane sing kempal nggeh tiyang jaler tok*” = (Dulu sebelum ada PPK kaum perempuan tidak pernah ikut Musyawarah, apalagi mengusulkan pendapat / usulan, kalau ada program perempuan tahu setelah ada pembangunan karena biasanya yang musyawarah hanya laki-laki saja). Pada kegiatan program kemiskinan sebelum PPK kaum perempuan tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelestarian. Hal ini terjadi karena program yang pernah ada bersifat *Top Down* sehingga masyarakat merasa tidak pernah

dilibatkan, masyarakat tidak diberi kesempatan, selain itu budaya masyarakat yang belum terbiasa merencanakan suatu kegiatan. Apabila ada program masyarakat tinggal menikmati hasilnya tanpa ikut terlibat didalamnya.

Distribusi partisipasi perempuan pada program pemerintah sebelum PPK dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 : Distribusi Partisipasi Perempuan pada Program kemiskinan lain sebelum PPK

Kategori	Distribusi	Frekuensi	Prosentasi
Tinggi	18 – 21	-	-
Sedang	15 - 17	-	-
Rendah	7 - 14	99	100 %

Sumber : Data Primer yang diolah

5.3.2. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam PPK

Dalam kegiatan PPK di Kecamatan Wonosalam tingkat partisipasi meliputi

beberapa kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan perencanaan

1). Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dimulai dari tingkat kecamatan dengan nama MAD (Musyawarah Antar Desa) yang pesertanya terdiri dari 6 orang wakil (3 orang dari wakil perempuan) dari masing-masing desa, Dinas instansi tingkat kecamatan dan warga masyarakat yang mau hadir dalam kegiatan ini, sosialisasi PPK yang disampaikan meliputi latar belakang, azas, tujuan prinsip, sasaran, pendanaan dan ketentuan dasar PPK, alur kegiatan PPK, organisasi pelaksanaan program, pelaku PPK. Setelah itu dilanjutkan sosialisasi di masing-masing wilayah Kecamatan yang disebut MD I (MD sosialisasi) pada kegiatan ini sama dengan MAD yaitu mensosialisasikan apa itu PPK, pemilihan 2 orang Fasilitator Desa (FD) laki-laki dan perempuan, pemilihan Tim pengelola kegiatan (TPK) yang terdiri dari ketua, Bendahara, Sekretaris dan penyusunan jadwal sosialisasi tingkat dusun atau kelompok. Dalam kegiatan ini dihadiri Kepala Desa, perangkat, BPD, LKMD, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat (laki-laki dan perempuan), pemuda dan masyarakat yang mau hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan selanjutnya yaitu Sosialisasi tingkat dusun atau kelompok, dalam kegiatan ini dipandu oleh TPK dan FD dengan tujuan mensosialisasikan PPK ke tingkat dusun atau kelompok –kelompok, kelompok yang disosialisasi meliputi kelompok laki-laki atau campuran dan kelompok khusus perempuan, dalam kegiatan ini biasanya FD memasuki kelompok – kelompok yang memang sudah ada kegiatan dan pertemuan rutin misalnya : kelompok laki-laki/ campuran yaitu kelompok RT, RW,

dan Yasinan, sedang untuk kelompok perempuan melalui kelompok PKK RT, PKK RW, Yasinan, arisan Fatayat, Muslimat dll.

Dengan sosialisasi yang dilaksanakan dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat dusun atau kelompok diharapkan PPK diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga masyarakat dapat terlibat / berpartisipasi mulai dari sosialisasi, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Dusun/ kelompok partisipasi kehadiran perempuan yang paling banyak adalah pada kegiatan sosialisasi tingkat dusun atau tingkat kelompok, hal ini terjadi karena pada umumnya di semua Desa se Kecamatan Wonosalam kaum perempuan memiliki kelompok yang sudah mempunyai kegiatan rutin berupa kegiatan yasinan, arisan, pengajian baik itu mingguan , bulanan dan slapanan. Sehingga dalam kegiatan sosialisasi PPK dapat dilaksanakan dengan kegiatan perempuan yang sudah berjalan sebelumnya, sedangkan sosialisasi di tingkat Kecamatan (MAD) dan tingkat Desa (MD I) perempuan yang dihadirkan hanya perwakilan.

2). Penggalan Gagasan

Kegiatan penggalan Gagasan merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan di dusun atau kelompok-kelompok, disini masing –masing kelompok mengidentifikasi masalah yang dihadapi sehingga dari identifikasi masalah tersebut muncullah usulan-usulan kegiatan yang kemudian ditetapkan menjadi usulan dibutuhkan masyarakat pada kelompok tersebut, dalam kegiatan penggalan gagasan dibagi

menjadi dua yaitu kelompok yang khusus anggotanya perempuan dan kelompok yang anggotanya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan sehingga dalam kegiatan ini akan diperoleh usulan yang khusus dari perempuan dan dari campuran, dengan demikian masyarakat sudah mulai berpartisipasi / terlibat dalam penetapan usulan tingkat kelompok.

Usulan yang diusulkan dari kelompok perempuan akan dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MKP), kemudian usulan yang dari kelompok laki-laki atau campuran akan dibahas dalam Musyawarah Desa II (MD II). Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan penggalian gagasan ini hampir sama dengan partisipasi sosialisasi tingkat dusun/kelompok karena kegiatan penggalian gagasan juga memasuki pada kelompok-kelompok perempuan yang sudah ada kegiatannya secara rutin.

3). Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)

Dalam kegiatan ini biasanya dilaksanakan ditingkat desa dengan peserta wakil-wakil dari kelompok perempuan sehingga peserta disini semua perempuan, kegiatan MKP dipandu oleh fasilitator Desa Perempuan, dalam kegiatan MKP Partisipasi masyarakat khususnya partisipasi perempuan dalam kegiatan PPK memang sangat terlihat jelas karena salah satu dari prinsip PPK adalah keterlibatan perempuan.

Tujuan dari MKP adalah menentukan dua usulan kegiatan (SPP dan Usulan lainnya yang terdiri dari UEP, Kesehatan, Pendidikan, Saran Prasarana) memutuskan 3 orang wakil perempuan yang akan ikut

Musyawarah Antar Desa (MAD), dan memutuskan Wakil perempuan yang akan menjadi anggota Tim Penulis Usulan (TPU). Didalam MKP inilah kaum perempuan diberi kebebasan untuk memutuskan usulan tanpa dipengaruhi kaum laki-laki, hasil penetapan usulan dari kaum perempuan masing-masing desa berupa usulan SPP dan UEP, hal ini terjadi karena banyak masyarakat Wonosalam khususnya perempuan yang mempunyai kegiatan tani atau dagang selama ini belum banyak tersentuh program yang betul-betul memikirkan kebutuhan kaum perempuan yaitu berupa pinjaman bergulir sehingga apabila masyarakat khususnya perempuan memerlukan tambahan modal usaha biasanya tergantung pada rentenir/*bank titil* yang dirasakan bunganya sangat tinggi, ini terjadi karena masyarakat yang menengah ke bawah untuk pinjam modal ke bank harus ada jaminan dan prosesnya pun sangat rumit.

Pada PPK walaupun kaum perempuan diberikan hak yang sama dengan laki-laki tetapi pada kegiatan musyawarah Desa II yang pesertanya laki-laki dan perempuan kaum perempuan masih sering kalah dengan pendapat laki-laki kadang kala kaum perempuan sengaja mengikuti apa yang diputuskan oleh kaum laki-laki, ini terjadi karena adat / norma dan kebiasaan yang sudah mengakar pada masyarakat desa yang sudah menempel pada kebanyakan pemikiran perempuan kalau perempuan selalu mengalah atau mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan laki-laki, dengan adanya adat yang menempel tersebut dalam kegiatan PPK kaum perempuan diberi wadah tersendiri yaitu Musyawarah Desa Khusus

Perempuan yang pesertanya khusus perempuan, dengan demikian PPK mengajari perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

4). Musyawarah Desa II (MD II)

MD II merupakan tindak lanjut dari MKP yang pesertanya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat, DPD, LKMD, RT, RW, Tokoh Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, Tokoh Agama, wakil-wakil kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari MD II adalah mengesahkan hasil MKP, menetapkan satu usulan dari campuran, menetapkan 6 orang wakil masyarakat yang akan ikut dalam MAD di tingkat Kecamatan (Kepala Desa, Ketua TPK, 3 wakil perempuan) dari MKP dan satu orang wakil dari tokoh Masyarakat Laki-laki, menetapkan anggota TPU dan satu orang Calon pengamat MAD. Walaupun dalam kegiatan MD II sudah terlihat adanya partisipasi masyarakat dalam menetapkan usulan kegiatan maupun pemilihan wakil-wakil masyarakat tetapi partisipasi perempuan dalam menetapkan usulan biasanya masih kalah dengan kaum laki-laki, pada kegiatan MD II cenderung semua keputusan yang menentukan kaum laki-laki sedangkan partisipasi perempuan masih pasif.

5). MAD II dan MAD III

Partisipasi perempuan pada kegiatan MAD II dimasing-masing desa jumlahnya sama karena peserta MAD II per Desa 6 Orang 3 diantaranya wakil perempuan, dalam kegiatan ini dalam partisipasi pengambilan keputusan hampir sama antara kaum laki-laki dengan perempuan, hal ini

terjadi karena wakil-wakil perempuan yang hadir rata-rata orang-orang terpilih dari masing-masing Desa se Kecamatan dan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.

6). MD III

Musyawarah Desa III merupakan tindak lanjut dari MAD III yang bertujuan menyampaikan informasi hasil MAD III yang sudah diputuskan, dalam kegiatan ini masyarakat diundang agar mengetahui apa saja kegiatan yang dapat didanai dari PPK, tingkat kehadiran atau partisipasi perempuan dalam kegiatan ini biasanya lebih banyak dari kaum laki-laki karena untuk usulan SPP dan UEP yang rata-rata diusulkan dari kaum perempuan.

b). Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan merupakan kelanjutan dari kegiatan perencanaan yang meliputi :

1). Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan dilakukan setelah dilaksanakan Musyawarah desa III yaitu informasi hasil MAD III selain itu apabila desa yang bersangkutan pengajuan kegiatan SPP (Simpan Pinjam untuk Kelompok perempuan) dan UEP didanai maka pada kegiatan MD III calon peminjam / pemanfaat dihadirkan agar mengetahui mekanisme pelaksanaan selanjutnya.

Proses selanjutnya adalah pengajuan dana ke Kas Perbendaharaan Pembangunan Negara (KPPN) yang dilakukan oleh UPK, sebelum

TPK mengajukan pendanaan ke UPK masing-masing Desa yang didanai harus membuat SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) antara UPK dan TPK dengan mengetahui Lurah Desa, FK, PJOK dan Camat.

2). Pencairan dana dan Pelaksanaan Kegiatan UEP

Mekanisme pelaksanaan atau pencairan dana untuk kegiatan UEP yang dilaksanakan oleh UPK dilaksanakan pencairan sekaligus (100 %) dari dana kegiatan UEP, pada kegiatan pelaksanaan semua kelompok yang mengajukan dan didanai dihadirkan di balai Desa, proses pencairan dari UPK dicairkan ke TPK kemudian langsung dicairkan ke kelompok dan dilanjutkan ke anggota peminjam/pemanfaat dan tidak boleh diwakilkan. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada saat pelaksanaan selain calon peminjam juga dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat, BPD, LKMD dan tokoh Masyarakat.

c). Pelestarian

Pelestarian merupakan kelanjutan tahap pelaksanaan kegiatan, dalam kegiatan PPK baik itu kegiatan sarana prasarana, SPP, UEP semua harus dilestarikan. Kegiatan pelestarian untuk kegiatan sarana / Fisik berupa kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin maupun periodik dengan dana swadaya agar sarana / fisik yang sudah dibangun dapat terawat, sedangkan untuk kegiatan SPP dan UEP bentuk pelestariannya adalah pengembalian angsuran karena untuk kegiatan SPP maupun UEP

merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan oleh kelompok ke UPK selanjutnya UPK akan menggulirkan ke Kelompok lain yang mengajukan perguliran. Mekanisme perguliran baik itu SPP maupun UEP hampir sama dengan mekanisme program yaitu melalui Musyawarah mulai kelompok, MD dan MAD.

Dengan adanya prinsip PPK yaitu keterlibatan perempuan partisipasi perempuan mulai terlihat dalam setiap kegiatan PPK, Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan PPK dapat dilihat pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11 : Tingkat Kehadiran Masyarakat pada kegiatan PPK Tahun I sampai III di Kec. Wonosalam, 2003 -2005

No	Kegiatan	Tahun I (2003)				Tahun II (2004)				Tahun III (2005)			
		Jlh	L	P	OM	Jlh	L	P	OM	Jlh	L	P	OM
1	MAD I	125	68	57	-	111	30	81	-	127	73	54	-
2	Musdes I	2083	1076	1007	1459	621	440	180	520	1157	387	770	878
3	Pengalisan	11284	5241	6043	7899	11204	5241	6043	7809	11280	5241	6043	7800
4	gagasan	863	31	832	604	603	43	560	516	853	58	795	687
5	MKP	2083	1076	1007	1459	864	419	445	715	1197	397	800	908
6	Musdes II	147	84	63	-	163	98	65	-	162	75	87	-
7	MAD II	189	105	84	-	127	73	54	-	143	77	66	-
8	MAD III	845	212	633	592	1192	392	800	898	742	304	437	563
9	Musdes III	712	95	617	443	733	86	647	557	756	111	645	476
10	Musdes Pjwbn I	534	131	403	207	838	137	703	701	893	203	690	490
11	Musdes Pjwbn II	672	201	471	333	1222	311	911	1019	1279	408	871	985
	Musdes serah Terima												

Keterangan : L = Laki-laki, P = Perempuan, OM = Orang Miskin

Sumber : UPK PPK Wonosalam, 2005

Dilihat pada tabel diatas menunjukkan partisipasi Perempuan terbanyak pada kegiatan penggalan gagasan, karena pada kegiatan ini dilaksanakan pada

saat ada pertemuan kelompok-kelompok perempuan, sedangkan pada kegiatan MAD peserta perempuan hanya terbatas banyaknya wakil-wakil perempuan yaitu 3 orang dimasing-masing Desa dan ditambah undangan dari dinas instansi. Pada kegiatan Musdes I dan II partisipasi perempuan lebih kecil dari pada partisipasi Laki-laki hal ini terjadi karena undangan yang diberikan oleh kepala desa atau TPK biasanya banyak laki-laki, untuk kegiatan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) partisipasi perempuan lebih dominan, hal ini karena peserta yang diundang memang khusus perempuan sedangkan laki-laki yang hadir hanya pengurus atau pelaku PPK tingkat desa tetapi dalam hak pengambilan suara laki-laki yang hadir tidak mempunyai hak suara jadi hanya memonitor saja.

Menurut Eugen C, Erickson (1974 : 77), partisipasi pada dasarnya mencakup 2 bagian yaitu internal yaitu adanya rasa memiliki terhadap komunitas, partisipasi eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Partisipasi dalam kegiatan PPK menggunakan pendapat Eugen C, Erikson, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam tiap proses kegiatan PPK :

1. Identifikasi Permasalahan

Dalam kegiatan PPK identifikasi permasalahan dilaksanakan mulai dari penggalian gagasan kelompok, melalui pertemuan kelompok masyarakat baik kelompok perempuan maupun kelompok laki-laki atau campuran masyarakat diajak untuk mengidentifikasi : persoalan, hambatan, peluang untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama dan memahami

potensi yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga akan muncul usulan-usulan yang akan menjawab semua permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2. Proses Perencanaan

Hasil dari identifikasi permasalahan yang berupa usulan – usulan kegiatan, Kemudian dari sekian banyak usulan-usulan yang diusulkan dari masing-masing kelompok masyarakat diajak dan dilibatkan untuk membahas usulan berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi bersama , untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama sehingga muncullah usulan kegiatan sebanyak tiga usulan (Dua dari perempuan dan Satu dari usulan Laki-laki dan Perempuan / Campuran) yang akan diajukan ke PPK, disamping itu masyarakat juga dilibatkan dalam penulisan usulan kegiatan yang berupa proposal kegiatan.

3. Pelaksanaan kegiatan

Pada kegiatan PPK pada prinsipnya pelaksanaannya harus dikerjakan secara swakelola atau dikerjakan oleh masyarakat sendiri dan tidak boleh dikontrakkan. Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat diajak dan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, disamping itu masyarakat juga dituntut terlibat dalam berpartisipasi swadaya baik berupa uang, material atau tenaga sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan kegiatan..

4. Evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan PPK sebelum serah terima kegiatan harus dilaksanakan musyawarah Pertanggung Jawaban yang dilaksanakan paling sedikit dua kali, pada kegiatan ini Tim Pelaksana kegiatan di masing-masing Desa mempertanggung jawabkan dana yang sudah dilaksanakan, selain itu diadakan evaluasi kegiatan sehingga masyarakat secara luas dapat memberikan saran atau masukan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPK.

5. Mitigasi

Selain kegiatan evaluasi masyarakat juga dapat terlibat dalam mengukur pelaksanaan kegiatan PPK yang sudah dilaksanakan melalui musyawarah pertanggungjawaban maupun secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mengurangi dampak negative pembangunan, dengan demikian masyarakat akan mengetahui hasil kegiatan yang dikerjakan oleh TPK.

6. Monitoring

Dalam pelaksanaan kegiatan PPK telah dibentuk Tim Monitoring atau sering disebut Tim 18 yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil tokoh masyarakat yang dipilih dalam musyawarah Desa III dan berjumlah 18 orang yang terdiri dari Tim 6 (beranggotakan 6 orang) : bertugas memonitor keberadaan dan isi papan informasi, memeriksa administrasi dan pembukuan beserta bukti-bukti kwitansi yang dikerjakan TPK, Tim 5 (berjumlah 5 orang) : bertugas memeriksa dan menghitung semua transaksi yang dilaksanakan TPK baik penerimaan uang dari UPK maupun

pembayaran ke suplaiyer atau Toko, Tim 4 (berjumlah 4 orang) : Bertugas membantu TPK dalam pengadaan material maupun pengadaan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, Tim 3 (beranggotakan 3 orang) : bertugas dalam pengecekan hasil pembelian bahan atau material dan peralatan yang dibeli atau disewa. Walaupun sudah ada Tim Monitoring masyarakat secara luas diberi wewenang untuk memonitor secara terbuka, dengan demikian dalam kegiatan PPK masyarakat dilibatkan untuk ikut memonitoring, dengan kegiatan ini diharapkan proses pembangunan dapat berkelanjutan.

Wujud partisipasi seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi dapat bermacam-macam, wujud partisipasi dalam PPK menggunakan pendapat Simanjuntak dalam Kodir (1990/1991 : 9) yang menyatakan 5 jenis partisipasi antara lain :

- Partisipasi Pikiran

Partisipasi ini diberikan dalam bentuk ide-ide, gagasan dan saran pendapat atau masukan pada saat pertemuan atau musyawarah, rapat, penulisan usulan/proposal.

- Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga diberikan berupa tenaga fisik, yang dilakukan oleh individu atau partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada saat kerja bakti atau gotong-royong.

- Partisipasi benda

Partisipasi benda diberikan berbentuk sumbangan uang untuk menunjang kegiatan program.

- Partisipasi Ketrampilan

Partisipasi ketrampilan berbentuk sumbangan kemahiran atau ketrampilan seseorang untuk kepentingan masyarakat.

- Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial diartikan sebagai anggota kelompok, dengan mengikuti kegiatan yang ada di kelompok seperti arisan, simpan-pinjam dan lain-lain.

5.3.3. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan UEP pada PPK

a) Perencanaan

Mulai dari kegiatan perencanaan hasil dari Penggalan gagasan kelompok Perempuan dan Musyawarah Khusus Perempuan usulan yang diajukan mulai pada tahun I sampai tahun III adalah Kegiatan SPP dan UEP. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan terhadap kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di kecamatan Wonosalam sangat tinggi , kegiatan UEP di semua desa merupakan kegiatan yang diusulkan oleh perempuan pada tahap perencanaan. Munculnya usulan kegiatan UEP dari usulan Perempuan terjadi karena masyarakat di Kecamatan Wonosalam sebagian besar bermata pencaharian Petani dan Buruh tani, untuk biaya pengerjaan sawah biasanya masyarakat banyak yang meminjam kepada seseorang di masing-masing Desa yang memang meminjamkan uang kepada petani untuk biaya pengolahan, dengan

kesepakatan sebelumnya, yaitu pemberi pinjaman memberikan pinjaman dengan syarat dibayar dengan hasil pertanian (padi) yang harganya ditentukan oleh pemberi pinjaman, sehingga kalau dihitung-hitung keuntungan pemberi pinjaman akan untung besar, kebiasaan seperti ini sudah terjadi hal yang biasa dihadapi oleh masyarakat yang tidak punya modal karena hal ini bagi masyarakat merupakan hal yang mudah dari pada harus pinjam ke perbankan yang persyaratannya dianggap rumit dan harus ada jaminan yang belum tentu dimiliki, Dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan yang didalamnya ada kegiatan UEP masyarakat khususnya perempuan sangat tertarik karena syarat yang diajukan sangat mudah yaitu melalui kelompok yang sudah berdiri satu tahun, ada kegiatan rutin, ada pengurus tetap dan anggotanya calon peminjam harus mempunyai usaha dan sistem pembayaran bisa dibayar satu bulan sekali atau musiman.. Dengan persyaratan tersebut masyarakat khususnya perempuan menyambut gembira karena di masing-masing desa sudah banyak kelompok yang mempunyai persyaratan tersebut, sehingga munculah usulan kegiatan UEP. Rekap Hasil Usulan dari Perempuan atau MKP dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 : Hasil Usulan yang diajukan mulai Tahun I sampai III di Kec. Wonosalam, 2003 - 2005

No	Desa	Asal Usulan	Tahun I(2003)		Tahun II(2004)		Tahun III(2005)	
			Keg	Ket	Keg	Ket	Keg	Ket
1	Lempuyang	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	v
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	-
		MD II	Jalan	v	Jalan	v	Jalan	-
2	Karangrejo	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	v

		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	-	Jalan	v
3	Wonosalam	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	-	Jalan	v
4	Jogoloyo	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	-	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	-	Jalan	v
5	Kendaldoyong	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	-
		MKP	UEP	-	UEP	v	UEP	-
		MD II	Jalan	-	Jalan	v	Jalan	-
6	Mranak	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	-
		MKP	UEP	-	UEP	v	UEP	-
		MD II	Madin	v	Jalan	v	Jalan	-
7	Tlogodowo	MKP	SPP	-	SPP	-	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	-	UEP	-
		MD II	Jalan	v	Jalan	-	Jalan	-
8	Kalianyar	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	-	UEP	-
		MD II	Jalan	v	Jalan	v	Jalan	-
9	Karangrowo	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	-	UEP	-
		MD II	Jalan	v	Jalan	-	Jalan	-
10	Tlogorejo	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	-	UEP	-
		MD II	Jalan	-	Jalan	-	Jalan	v
11	Doreng	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	-	Jalan	v
12	Botorejo	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	v
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	-	Jalan	v
13	Pilangrejo	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	v	Madin	v
14	Bunderan	MKP	SPP	-	SPP	-	SPP	-

		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	-
		MD II	Jembtn	v	Jalan	-	Jalan	v
15	Kerangkulon	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	-
		MD II	Jalan	-	Jalan	v	TK	-
16	Sidomulyo	MKP	SPP	v	SPP	v	SPP	v
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	v	Jalan	v
17	Getas	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	v
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	v	Jalan	v	Jalan	-
18	Mojodemak	MKP	SPP	v	SPP	-	SPP	v
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	v	Jalan	v	Jalan	v
19	Mrisen	MKP	SPP	-	SPP	-	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	v	Jalan	-	Jalan	v
20	Kuncir	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	v	Jalan	v
21	Trengguli	MKP	SPP	-	SPP	v	SPP	-
		MKP	UEP	v	UEP	v	UEP	v
		MD II	Jalan	-	Jalan	v	Jalan	v

Ket: V = Didanai PPK, - = Tidak didanai PPK

Sumber : UPK PPK Wonosalam 2005

Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Wonosalam yang telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memutuskan usulan disambut dengan gembira, sehingga perempuan bisa mengusulkan kegiatan yang sebenarnya mereka butuhkan sudah lama, dengan kegiatan UEP masyarakat khususnya perempuan berharap dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Kegiatan UEP merupakan modal abadi

masyarakat yang apabila dikelola dengan benar akan sangat bermanfaat untuk masyarakat se Kecamatan Wonosalam.

Tabel 13 : Distribusi Frekuensi Partisipasi Perempuan pada Kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak

Variabel	Kategori	Distribusi	Frekuensi	Prosentasi
Perencanaan	Tinggi	18 – 21	39	39.39 %
	Sedang	13 – 17	28	28.29 %
	Rendah	8 – 12	32	32.32 %
Pelaksanaan	Tinggi	5 – 6	62	62.6 %
	Sedang	3 – 4	37	37.4 %
	Rendah	1 - 2	-	-
Pengawasan	Tinggi	3	21	21.2 %
	Sedang	2	26	26.3 %
	Rendah	1	52	52,5 %
Evaluasi	Tinggi	8 – 9	-	-
	Sedang	6 – 7	23	24 %
	Rendah	3 - 5	76	76 %
Pelestarian	Tinggi	13 – 15	96	96.6 %
	Sedang	10 – 12	3	3.1 %
	Rendah	7 – 9	-	-
Manfaat	Tinggi	13 – 15	94	94.9 %
	Sedang	10 – 12	5	5.1 %
	Rendah	7 - 9	-	-

Sumber : Data primer yang diolah

Dari Tabel 13 dapat diketahui bahwa dalam kegiatan perencanaan khususnya pada penetapan usulan kegiatan partisipasi perempuan terhadap kegiatan UEP sangat tinggi, hal ini terjadi karena pada perencanaan kaum

perempuan diberi kesempatan untuk menentukan usulan tanpa dipengaruhi oleh kaum laki-laki, dengan demikian perempuan sebenarnya sudah mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari, dengan usulan kegiatan UEP kaum perempuan berharap dapat membantu menambah modal usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi perempuan ada perencanaan sangat tinggi (39.39%) pada saat sosialisasi tingkat kelompok dan penggalan gagasan / penetapan usulan tingkat kelompok hal ini terjadi karena pada pertemuan ini melalui pertemuan kelompok perempuan yang sudah berjalan rutin di masing-masing desa seperti Tahlilan, PKK, Muslimat, Fatayat, samprohan dan kelompok pertemuan perempuan yang lainnya, sedangkan untuk perencanaan yang lainnya seperti MKP, MD II, Penulisan Usulan, MAD II dan MAD III perempuan yang mengikuti hanya perwakilan dari masing-masing kelompok perempuan.

b) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan UEP dimulai setelah kegiatan MD III, prosedur pencairan dana UEP dilakukan oleh ketua TPK dengan cara mengajukan Rencana penggunaan dana (RPD) ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian UPK mensertifikasi RPD yang diajukan, Setelah RPD di sertifikasi dan mendapat persetujuan dari Fasilitator kecamatan dan PjOK PPK dana untuk kegiatan UEP dicairkan 100 %, sistem pencairan UEP ketua Kelompok dan calon Peminjam dihadirkan di Balai Desa masing-masing dan dihadiri oleh Kepala desa, Perangkat, BPD, TPK, LKMD, Tim Monitoring

dan Tokoh Masyarakat. Kemudian UPK mencairkan dana UEP ke TPK, TPK mencairkan ke Ketua kelompok dan melalui Ketua kelompok langsung diserahkan kepada peminjam yang disaksikan langsung oleh wakil masyarakat yang dihadirkan dilanjutkan pertanggung jawaban dana oleh TPK. Dengan sistem ini diharapkan penyaluran dana UEP sesuai dengan apa yang sudah diverifikasi sehingga tidak salah sasaran dan menjaga agar tidak terjadi nama fiktif. Pada kegiatan pelaksanaan kegiatan UEP partisipasi masyarakat dapat dinilai tinggi (62.6%), hal ini terjadi karena mulai persiapan sampai pelaksanaan calon pemanfaat dan ketua kelompok dihadirkan dan diajak musyawarah menyiapkan proses pencairan sedangkan pada pelaksanaan kegiatan / pencairan dana UEP dan SPP harus dihadiri sendiri oleh calon pemanfaat, sehingga tingkat kehadiran pada tahap ini sangat besar.

c) Pengawasan

Hasil penelitian pada tahap ini partisipasi masyarakat khususnya perempuan persentasenya masih rendah (21.2%), walaupun sebagian sudah ikut terlibat dalam pengawasan, hal ini disebabkan karena budaya yang masih berlaku, perempuan belum terbiasa mengadakan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan, ” *nek ken ngawasi pelaksanaan kegiatan tiyang setri mboten pantes* ” = (Kalau untuk mengawasi kegiatan diawasi perempuan tidak sesuai). Dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadi biasanya memang orang laki-laki, selain itu sudah dibentuk Tim monitoring (tim 18) sehingga masyarakat merasa pekerjaan itu sudah tugas

dan tanggung jawab tim 18 yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil masyarakat dan dipilih pada MD III.

d) Evaluasi

Partisipasi perempuan pada evaluasi hasil kegiatan PPK masih sangat rendah, hal ini terjadi juga sama dengan pengawasan, masyarakat sudah mempercayakan pada tim 18 yang sudah terbentuk sehingga dalam kegiatan evaluasi kaum perempuan merasa tidak mampu, selain itu masyarakat menganggap bahwa proses evaluasi hanya bisa dilakukan oleh aparat pemerintah, dengan demikian masyarakat perempuan dalam melakukan evaluasi masih sangat rendah walaupun sudah disosialisasikan bahwa PPK berazaskan DOUM (Dari Oleh Untuk Masyarakat) jadi semua kegiatan yang dilaksanakan pada PPK diusulkan dari masyarakat, dikerjakan, diawasi, dievaluasi oleh masyarakat dan digunakan untuk masyarakat, dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan diharapkan masyarakat nantinya timbul rasa memiliki atau orang Jawa bilang "*melu andarbeni*", sehingga dalam hal ini masih perlu disosialisasikan secara terus menerus kepada masyarakat agar masyarakat memahami tujuan PPK.

e) Pelestarian

Partisipasi perempuan pada tahap pelestarian untuk kegiatan UEP sangat tinggi (96,6%), ini terbukti dengan pengembalian angsuran yang dilakukan secara rutin oleh kelompok perempuan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat antara UPK dan Ketua Kelompok, sedangkan kegiatan UEP untuk

kelompok laki-laki pengembalian angsuran mengalami tunggakan, hal ini disebabkan kelompok laki-laki pekerjaannya hanya mengandalkan dari hasil pertanian saja sehingga apabila pertanian gagal panen maka bisa dipastikan pembayarannya akan terganggu, selain itu sudah menjadi budaya kelompok laki-laki apabila ada program yang berupa simpan pinjam bisa dipastikan tidak bayar karena masih terpengaruh dengan program-program sebelumnya yang beranggapan ”uang bantuan tidak perlu dikembalikan”.

Pada PPK sistem angsuran yang disepakati di UPK Wonosalam ada dua sistem yaitu bulanan dan Musiman. Angsuran / Pengembalian dari masing-masing Kelompok dimasing-masing Desa ditampung oleh TPK kemudian disetor ke UPK, kemudian akan digulirkan lagi ke kelompok-kelompok yang mengajukan perguliran. Untuk kegiatan perguliran SPP dan UEP di Kecamatan Wonosalam dari tahun 2003 sampai 2008 dana yang sudah dipinjamkan sebesar Rp.12.694.150.000,- dengan jumlah kelompok 804 dan jumlah pemanfaat 8.580 Orang, secara lengkap data kelompok UPK Kec. Wonosalam dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 : Data Kelompok UPK Kec. Wonosalam Tahun 2003 - 2008

NO	DESA	JUMLAH PINJAMAN (Rp)	JML KELP	JML PMFT	KET
1	Mrisen	969.500.000	59	568	Aktif
2	Bunderan	886.700.000	29	602	Aktif
3	Kuncir	1.472.650.000	90	813	Aktif
4	Getas	701.450.000	38	473	Aktif
5	Sidomulyo	1.019.900.000	85	767	Aktif

6	Pilangrejo	1.629.500.000	73	712	Aktif
7	Tlogorejo	734.200.000	66	809	Kurang Aktif
8	Jogoloyo	257.150.000	13	176	Aktif
9	Mojodemak	1.316.350.000	70	809	Aktif
10	Kendaldoyong	264.550.000	19	262	Aktif
11	Lempuyang	106.650.000	21	164	Kurang Aktif
12	Mranak	428.550.000	18	279	Aktif
13	Wonosalam	489.300.000	43	277	Aktif
14	Botorejo	327.800.000	19	277	Aktif
15	Doreng	204.150.000	10	259	Aktif
16	Karangrejo	1.115.800.000	57	592	Aktif
17	Trengguli	340.500.000	40	238	Aktif
18	Kerangkulon	219.800.000	29	217	Aktif
19	Karangrowo	102.100.000	14	154	Aktif
20	Kalianyar	88.650.000	8	102	Kurang Aktif
21	Tlogodowo	18.900.000	3	30	Tidak Aktif
JUMLAH		12.6494.150.000	804	8.580	

Sumber : Laporan UPK Mei 2008

f) Manfaat

Manfaat kegiatan UEP bagi kaum perempuan sangat bermanfaat khususnya bagi perempuan yang mempunyai usaha baik pertanian, dagang, jasa maupun usaha yang lainnya, karena dengan adanya UEP kelompok perempuan dapat lebih mudah untuk meminjam dana UEP maupun SPP tanpa persyaratan yang memberatkan yaitu dengan persyaratan kelompok sudah berdiri lebih dari satu, mempunyai kegiatan rutin, ada pengurus tetap, ada pertemuan rutin,

dan ada administrasi kelompok, selain itu pinjaman tidak ada jaminan hanya perjanjian tanggung renteng kelompok yaitu perjanjian apabila ada anggota yang tidak membayar angsuran harus ditanggung bersama-sama, selain itu dengan adanya UEP membuat kelompok perempuan yang sudah mempunyai kegiatan rutin menjadi lebih aktif dan mempunyai tambahan pendapatan dari IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) dari UPK, untuk kegiatan UEP hampir semua kelompok perempuan yang sudah mempunyai kegiatan rutin di masing-masing desa memanfaatkan dana pinjaman UEP dari UPK PPK Kecamatan Wonosalam, bahkan semakin lama kelompok maupun anggota yang meninjam semakin bertambah.

5.3.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi

Menurut Manan dalam Rohmad (1994 : 29), seorang ahli antropologi menyatakan partisipasi dipengaruhi oleh Budaya yang ada atau yang berlaku di masyarakat. seorang ahli sosiologi berpendapat bahwa partisipasi di pengaruhi oleh saling keterhubungan (*natural relationship*) diantara individu atau kelompok yang ada di masyarakat. Lionberger dan Gwin dalam Rohmad (1994 : 31) menyatakan bahwa partisipasi individu tergantung pada kondisi individu dan fungsi situasi. Berdasarkan uraian tersebut Rohmad (1994 : 320) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat adalah faktor budaya, karakteristik sosiologis individual dengan faktor perantara, faktor ketersediaan pemimpin dalam pembagian kekuasaan, keterdedahan media masa dan kondisi psikologis.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan tanpa paksaan, sedangkan faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah faktor internal dalam masyarakat yaitu : persepsi, budaya, sosial dan ekonomi dan faktor eksternal di luar masyarakat.

Persepsi merupakan penafsiran atau proses pengambilan keputusan tentang pemahaman yang diterima oleh seseorang . Penafsiran tersebut mencakup banyak hal, antara lain : penafsiran tentang perilaku individu, keadaan lingkungan, suasana hati, keinginan, kemauan dan harapan (Tubbs dan Moss, 1996 : 40). Berdasarkan hal tersebut persepsi dalam PPK menggunakan pendapat Tubbs dan Moss, dapat disimpulkan bahwa :

- a) Persepsi dapat berupa kesan, penafsiran atau penilaian berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. Pendapat masyarakat tentang PPK sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya perempuan, masyarakat perempuan merasakan terlibat dalam kegiatan SPP maupun UEP.
- b) Persepsi merupakan keputusan yang diambil terhadap sesuatu obyek atau stimulan yang menyangkut perilaku individu, keadaan lingkungan, suasana hati, dan harapan – harapan. Dalam kegiatan PPK masyarakat khususnya perempuan berpendapat sangat bermanfaat dalam keterlibatannya dalam PPK.
- c) Persepsi merupakan produk atau proses psikologis yang dialami seseorang setelah menerima stimuli, yang mendorong tumbuhnya motivasi untuk memberikan respon atau melakukan / tidak melakukan sesuatu kegiatan. Dengan adanya PPK masyarakat merasa terbantu

dalam pembangunan di desanya dan sangat membantu dalam pengembangan usaha dari kegiatan UEP.

Pada pelaksanaan PPK masyarakat dapat terlibat secara aktif dari seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelestariannya. PPK merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat sadar dan terlibat dalam proses pembangunan, proses pengembangan masyarakat sendiri terletak pada keberhasilan dalam penyuluhan sumberdaya yang ada di masyarakat dan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku PPK di tingkat Kecamatan, sehingga masyarakat mampu mengelola secara sistematis, mandiri dan partisipatif dalam pembangunan di pedesaan.

Dalam penelitian selain persepsi dan sosial budaya peneliti juga meneliti tentang faktor – faktor yang karakteristik yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada kegiatan PPK, yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan jumlah tanggungan keluarga.

a) Umur

Partisipasi perempuan pada kegiatan UEP dalam PPK yang berhubungan dengan umur dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 : Distribusi frekuensi pengaruh partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK yang berhubungan dengan umur

Umur (Th)	Kategori/ Distribusi	Perencanaan		Pelaksanaan		Pengawasan		Evaluasi		Pelestarian		Manfaat	
		Fre kuensi	%	Fre kuensi	%	Fre kuensi	%	Fre kuensi	%	Fre kuensi	%	Fre kuensi	%
20-30	Tinggi	14	14	14	14	6	6	0	-	15	15	15	15
	Sedang	1	1	1	1	6	6	8	8	0	-	0	-
	Rendah	-	-	0	-	3	3	7	7	0	-	0	-
31-40	Tinggi	16	16	23	23	6	6	0	-	30	30	30	30
	Sedang	11	11	7	7	13	13	11	11	0	-	0	-
	Rendah	3	3	0	-	10	10	19	19	0	-	0	-
41-50	Tinggi	5	5	14	14	4	4	0	-	28	28	30	30
	Sedang	10	10	16	16	6	6	2	2	2	2	0	-
	Rendah	15	15	0	-	20	20	28	28	0	-	0	-
51-60	Tinggi	-	-	5	5	0	-	0	-	15	15	18	18
	Sedang	-	-	14	14	1	1	0	-	4	4	1	1
	Rendah	19	19	0	-	19	19	19	19	0	-	0	-
> 61	Tinggi	-	-	2	2	0	-	0	-	5	5	1	1
	Sedang	-	-	3	3	0	-	0	-	0	-	4	4
	Rendah	5	5	0	-	5	5	5	5	0	-	0	-
Jumlah		99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari hasil penelitian partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan paling tinggi pada umur 20 – 40 tahun, sedangkan pada umur yang diatas 40 tahun partisipasi pada proses perencanaan sudah mulai menurun, hal ini disebabkan pada umur 20 – 40 tahun merupakan umur produktif dan perempuan pada umur tersebut masih aktif dalam mengikuti kegiatan – kegiatan yang diadakan di kelompok dusun atau desa, sedangkan untuk perempuan yang mempunyai umur diatas 50 tahun juga masih berpartisipasi tetapi sifatnya pasif. Partisipasi perempuan pada proses evaluasi pada umur 20 – 30 tahun paling tinggi sedangkan umur diatas 40 tahun partisipasi pada proses evaluasi masih rendah, masyarakat khususnya perempuan belum terbiasa, mereka merasa tidak mempunyai hak untuk mengevaluasi suatu program karena tugas untuk mengevaluasi adalah tugas pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang.

Partisipasi pada proses pelestarian dan manfaat kegiatan UEP yang paling banyak pada perempuan yang berumur 20-60 tahun, perempuan pada umur tersebut sebagian besar mempunyai kegiatan usaha sendiri, pengembalian dan perguliran UEP berjalan lancar, sehingga pada proses pelestarian kegiatan UEP partisipasi perempuan sangat tinggi. Partisipasi pelestarian pada kelompok laki-laki prosentasenya rendah dikarenakan usaha yang dimiliki laki-laki hanya sebagai petani dan istrinya rata-rata tidak mempunyai pekerjaan lain sehingga sumber untuk membayar angsuran hanya berasal dari pertanian, selain itu juga dipengaruhi budaya yang sudah ada banyak pinjaman yang berasal dari pemerintah tidak pernah dikembalikan karena tidak pernah ada sangsinya.

b) Pendidikan

Tingkat partisipasi perempuan pada kegiatan UEP yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 : Distribusi frekuensi pengaruh partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK yang berhubungan dengan Pendidikan

Pendidikan	Kategori/Distribusi	Perencanaan		Pelaksanaan		Pengawasan		Evaluasi		Pelestarian		Manfaat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak sekolah	Tinggi	-	-	2	2	-	-	-	-	10	10	6	6
	Sedang	-	-	8	8	1	1	-	-	-	-	4	4
	Rendah	10	10	-	-	9	9	10	10	-	-	-	-
SD	Tinggi	-	-	8	8	-	-	-	-	29	29	32	32
	Sedang	7	7	25	25	-	-	-	-	4	4	1	1
	Rendah	26	26	-	-	33	33	33	33	-	-	-	-
SMP	Tinggi	1	1	12	12	1	1	-	-	16	16	18	18
	Sedang	14	14	6	6	7	7	-	-	2	2	-	-
	Rendah	3	3	-	-	10	10	18	18	-	-	-	-
SMA	Tinggi	34	34	35	35	16	16	-	-	38	38	38	38
	Sedang	4	4	3	3	17	17	22	22	-	-	-	-
	Rendah	-	-	-	-	5	5	16	16	-	-	-	-
Jumlah		99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100

Sumber : Data primer yang diolah

Dari hasil penelitian pada proses perencanaan dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK yang paling tinggi adalah perempuan yang berpendidikan SMA, karena pada proses perencanaan mulai dari kegiatan musyawarah lainnya seperti MAD, Musyawarah Desa I (MD I), MKP, MD II, MD III, MD Pertanggung Jawaban dan MD Serah Terima wakil perempuan yang dihadirkan kebanyakan orang-orang terpilih yang dianggap mampu untuk diajak musyawarah, berani menyampaikan pendapat dan dapat berargumentasi, dari hasil penelitian rata-rata wakil perempuan yang ikut dalam musyawarah tersebut mempunyai pendidikan SMA ke atas sehingga perempuan yang tidak diundang pada kegiatan ditingkat desa tidak akan mengikuti pertemuan atau kegiatan, tetapi pada perencanaan ditingkat kelompok maupun dusun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi perempuan karena wadah kegiatan yang digunakan adalah kelompok yang memang sudah ada dan sudah berjalan rutin di

kelompok / dusun masing-masing seperti yasinan, tahlilan, fatayat, muslimat dan lain-lain. Sedangkan partisipasi pada proses pengawasan perempuan yang berpendidikan SMP dan SMA sudah mulai terlibat, sedangkan yang mempunyai pendidikan SD maupun tidak sekolah partisipasinya masih rendah karena perempuan yang tidak bersekolah atau hanya sekolah selalu berpartisipasi pasif.

Partisipasi perempuan dalam PPK pada proses evaluasi tingkat pendidikan tidak berpengaruh yaitu rata-rata masih rendah hal ini disebabkan karena belum biasa, perempuan merasa tidak mempunyai hak untuk melakukan evaluasi dan masih berpendapat yang berhak mengevaluasi suatu program adalah pemerintah dan lembaga lain yang lebih berwenang.

Menurut Rogers dan Schumaker dalam Rohmad (1994 : 31) menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh karakteristik sosial individu dan terpaan massa, menurutnya semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan dan prestise pekerja, semakin tinggi partisipasinya. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang partisipasinya semakin aktif.

c) Pekerjaan

Partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam dapat dilihat pada Tabel 17

Tabel 17 : Distribusi frekuensi pengaruh partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK yang berhubungan dengan pekerjaan.

Pekerjaan	Kategori/Distribusi	Perencanaan		Pelaksanaan		Pengawasan		Evaluasi		Pelestarian		Manfaat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak bekerja	Tinggi	-	-	4	4	1	1	-	-	4	4	-	-
	Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	Rendah	4	4	-	-	3	3	4	4	-	-	-	-
Tani	Tinggi	4	4	13	13	4	4	-	-	32	32	37	37
	Sedang	15	15	25	25	6	6	4	4	6	6	1	1
	Rendah	19	19	-	-	28	28	34	34	-	-	-	-
Dagang	Tinggi	32	32	45	45	14	14	1	1	57	58	57	58
	Sedang	12	12	12	12	18	18	17	17	-	-	-	-
	Rendah	13	13	-	-	25	25	39	39	-	-	-	-
Jumlah		99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100

Sumber : Data primer yang diolah

Dalam kegiatan PPK pada hasil penelitian proses perencanaan sampai manfaat secara umum partisipasi perempuan yang paling tinggi adalah perempuan yang mempunyai pekerjaan (dagang dan tani), karena dalam kegiatan UEP ada persyaratan untuk bisa ikut memanfaatkan harus mempunyai usaha, sehingga perempuan yang ikut memanfaatkan semua mempunyai pekerjaan atau mempunyai usaha, kegiatan UEP dipergunakan untuk usaha ekonomi produktif., sedangkan perempuan yang murni hanya sebagai ibu rumah tangga banyak yang tidak berani meminjam disamping tidak memenuhi kriteria juga mempunyai ketakutan sendiri akan sanksi tanggung renteng, kelompok kan merasa keberatan apabila anggota yang tidak mempunyai usaha ikut pinjam UEP karena akan mempengaruhi tingkat pengembalian atau angsuran. Pada proses pelestarian dan manfaat perempuan yang mempunyai pekerjaan dagang tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibanding dengan tani karena perempuan pekerjaan dagang mempunyai penghasilan tiap hari dan umumnya mempunyai pendapatan lain (tani), sedangkan yang murni sebagai petani pembayaran angsuran dilakukan dengan

sistem musiman setiap kali panen, untuk membayar angsuran pinjaman hanya mengandalkan dari hasil panen sehingga apabila gagal panen angsuran pembayaran akan terlambat.

d) Jumlah Tanggungan Keluarga

Dari hasil penelitian pengaruh partisipasi perempuan dalam UEP pada PPK selain umur, pendidikan, pekerjaan adalah jumlah tanggungan keluarga. Partisipasi perempuan yang berhubungan dengan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18 : Distribusi frekuensi pengaruh partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK yang berhubungan dengan Tanggungan Keluarga

Jumlah Tanggungan Keluarga	Kategori/Distribusi	Perencanaan		Pelaksanaan		Pengawasan		Evaluasi		Pelestarian		Manfaat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
1-2	Tinggi	29	29	32	32	15	15	-	-	43	43	44	44
	Sedang	8	8	11	11	16	16	17	17	1	1	-	-
	Rendah	7	7	1	1	13	13	27	27	-	-	-	-
3-4	Tinggi	6	6	22	22	2	2	-	-	47	47	49	49
	Sedang	13	13	28	28	8	8	4	4	3	3	1	1
	Rendah	31	31	-	-	40	40	46	46	-	-	-	-
5-6	Tinggi	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4	2	2
	Sedang	-	-	3	3	1	1	-	-	1	1	3	3
	Rendah	5	5	-	-	4	4	5	5	-	-	-	-
Jumlah		99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100

Sumber : Data primer yang diolah

Hasil penelitian perempuan yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga 1-2 anak pada proses perencanaan sampai manfaat partisipasinya tinggi, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga tingkat partisipasinya semakin menurun, hal ini terjadi karena jumlah tanggungan keluarga yang sedikit mempunyai waktu yang agak longgar, anak yang diurus tidak terlalu banyak menyita waktu, kebutuhan dan tanggung jawab yang dibutuhkan juga tidak begitu berat bila dibanding dengan yang mempunyai anak banyak, sehingga pada pemanfaat yang mempunyai anak banyak dalam pembayaran angsuran pinjaman akan semakin berat karena kebutuhan yang digunakan tiap hari sudah tinggi, untuk memenuhi semua kebutuhan itu harus memerlukan kerja keras sehingga pada perempuan yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga lebih dari 4 partisipasi dalam proses perencanaan sampai evaluasi sangat rendah karena lebih mementingkan pekerjaannya sendiri agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan faktor –faktor karakteristik yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK adalah : umur, pendidikan, pekerjaan.dan jumlah tanggungan keluarga.

5.3.5. Dampak Partisipasi Perempuan Terhadap Keberhasilan Kegiatan UEP

Dalam pelaksanaan PPK khususnya untuk kegiatan UEP di Kecamatan Wonosalam sampai saat ini masih berjalan baik, dari jumlah kelompok 804 dan jumlah anggota 8.580 Orang yang merupakan kelompok laki-laki sebanyak 8 kelompok dengan jumlah anggota 109 orang. Banyaknya pinjaman sudah beredar sebesar Rp 12.694.150.000. Saldo pinjaman sebanyak Rp 6.071.650.000,- dengan rincian pinjaman kelompok perempuan sebanyak Rp. 5.953.800.000,- dan pinjaman kelompok Laki-laki Rp. 117.850.000,- dan tunggakan yang ada sebesar Rp. 87.704.800,- jumlah ini yang merupakan tunggakan dari kelompok laki-laki sebesar Rp .14.001.400, yang selebihnya tunggakan dari kelompok perempuan, berdasarkan prosentasi tunggakan pinjaman kelompok laki-laki sebesar 11,88 % sedangkan tunggakan pinjaman untuk kelompok perempuan sebesar 1,2 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK sangat tinggi bila dibandingkan dengan kelompok Laki-laki.

Dampak partisipasi terhadap keberhasilan kegiatan UEP mempunyai dampak yang baik . Dampak dari partisipasi perempuan dalam keberhasilan UEP juga dapat dilihat pada tingkat kesehatan UPK Kecamatan Wonosalam masuk dalam kategori sehat. Tingkat Kesehatan UPK Kecamatan Wonosalam per Mei 2008 dapat dilihat pada **lampiran 2** . Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sangat berdampak pada keberhasilan kegiatan UEP, hal ini disebabkan oleh faktor sosial budaya yang sudah melekat pada kelompok perempuan, karena dalam pelaksanaan kegiatan UEP syarat untuk bisa memanfaatkan pinjaman UEP adalah kelompok yang sudah berjalan lebih satu tahun, mempunyai kegiatan rutin, mempunyai pengurus tetap, mempunyai administrasi kelompok, ada tanggung rentang kelompok dan mempunyai kegiatan usaha, sehingga apabila ada anggota yang tidak membayar akan dibayar dulu dengan kas kelompok dan akan merasa malu apabila tidak mengangsur pinjaman karena ada keterikatan kelompok.

B. Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya peranan perempuan serta bagaimana kemungkinan pemecahan masalah. Langkah yang ditempuh yang pertama adalah wawancara dan mengumpulkan warga masyarakat perwakilan dari masing-masing Desa yaitu Tim Pelestari Desa yang memang sudah mempunyai pertemuan rutin tiap bulan sekali pada minggu terakhir dengan difasilitasi oleh pelaku PPK di tingkat Kecamatan yaitu PjOK, PjAK, UPK, dan BKAD untuk bersama-sama mendiskusikan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh perempuan kemudian menentukan metode untuk pemecahan masalah yang diperlukan dan dilanjutkan dengan mengumpulkan berbagai informasi usulan dengan permasalahan yang ada, sampel diambil 11 desa masing – masing desa tiga

(3) kelompok dan masing-masing kelompok tiga (3) orang untuk menjadi responden dengan wawancara dan mengisi kuisioner . Model dari kegiatan partisipasi adalah dengan metode dialog sebagaimana yang dikembangkan oleh Freire dalam Sujana, (2000 : 87) dimana masyarakat membicarakan permasalahan yang ada dan bagaimana penecahan permasalahan tersebut secara bersama-sama anggota masyarakat lainnya. Pemecahan dilakukan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh warga masyarakat sehingga secara tidak langsung masyarakat sudah ikut berfikir.

Program Pengembangan Kecamatan mempunyai tujuan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sarannya adalah masyarakat miskin perdesaan. Pendekatan pembangunan yang menumbuhkan keberdayaan kepada masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Menurut Prijono dan Pranaka (1996:56), menyatakan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sendiri merupakan ide yang memanfaatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri. Sedangkan Korten dalam Tjokrowinoto (1995 : 25-26) , konsep pemberdayaan lebih menekankan masyarakat sebagai objek, yang berpusat pada manusia (*people centered development*), manusia dipandang sebagai warga masyarakat yang menjadi fokus atau sumber utama pembangunan, sehingga masyarakat harus mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Kegiatan penelitian ini mengupas tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK, dimana pada tujuan khusus disebutkan

meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, selain itu pada ketentuan dasar PPK juga disebutkan tentang keberpihakan pada perempuan. Pada pelaksanaan PPK mulai dari MAD wakil-wakil desa yang dihadirkan 3 dari 6 wakil desa harus dari wakil perempuan, demikian juga dalam Musyawarah-musyawarah di Desa harus ada wakil dari perempuan, selain itu pada PPK perempuan juga diberi kesempatan untuk mengusulkan 2 kegiatan dari 3 kegiatan yang diusulkan Desa melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) yang peserta semuanya perempuan.

Partisipasi perempuan sebelum ada PPK dari hasil wawancara diketahui masih sangat rendah misalnya pada program IDT, KUT, P3DT yang pernah ada perempuan merasa tidak pernah terlibat karena semuanya yang memutuskan adalah kaum laki-laki, perempuanpun tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena semua itu sudah merupakan program dari atas (*Top – down*). Pada pelaksanaan PPK perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, disamping itu dengan adanya PPK masyarakat khususnya perempuan mulai berani menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan mulai bisa memikirkan jalan pemecahannya sehingga berani mengemukakan pendapat untuk menetapkan usulan yang merupakan kebutuhan perempuan ditetapkan melalui MKP. Dalam PPK peran masyarakat dalam proses perencanaan lebih tinggi dari pada proses pelaksanaan dan proses pelestarian karena proses perencanaan membutuhkan waktu yang panjang.

Menurut Y. Slamet (1992 : 23), bahwa partisipasi pada tahap perencanaan paling tingkatannya bisa diukur dari derajat keterlibatannya. Pada tahap perencanaan sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat karena pada proses perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu program, untuk itu dalam proses perencanaan PPK masyarakat diajak bermusyawarah untuk menentukan usulan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Partisipasi perempuan dalam PPK pada proses perencanaan paling tinggi terlihat pada pertemuan dusun atau kelompok mulai dari sosialisasi, penggalan gagasan dan pengambilan keputusan mengenai usulan dari kelompok – kelompok dalam kegiatan ini partisipasi perempuan terlihat aktif. Hanna Djumhana (1995 : 101-103), mengemukakan Keikutsertaan dalam suatu kegiatan disertai dengan kelakuan baik berupa lisan (erbal) ataupun tingkah laku (perbuatan) maka ia dapat disebut partisipasi aktif, sedangkan sikap diam dan hanya menyetujui akan jalannya suatu kegiatan disebut partisipasi pasif. Dalam kegiatan PPK merupakan pembelajaran yang partisipatif karena lebih menekankan proses dari pada hasil, masyarakat di ajak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelastarian. Menurut Totok Mardikanto (2003 : 83), memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat untuk mampu dan berani menyampaikan pendapat.

Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan pasca PPK dan tidak lagi mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MD) yang merupakan kelanjutan dari PPK, walaupun demikian kegiatan PPK khususnya untuk kegiatan SPP maupun UEP masih berjalan baik, pengelolaan kegiatan yang dikelola oleh UPK berjalan baik dengan kategori tingkat kesehatan masuk kategori sehat, untuk kegiatan UEP yang hampir sebagian besar anggotanya perempuan masih berjalan baik, hal ini karena UEP bagi kelompok perempuan merupakan kegiatan yang benar-benar membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin, sebelum ada PPK masyarakat miskin apabila kekurangan dana untuk berusaha biasanya meminjam dari bank titil (rentenir) dengan jasa yang sangat tinggi (sampai 10 % per bulan) hal ini terjadi karena untuk meminjam ke Bank harus ada jaminan sehingga untuk meminjam ke Bank masyarakat banyak yang tidak mampu. Dengan adanya PPK hampir semua usulan dari MKP adalah SPP dan UEP, kegiatan SPP dan UEP sangat membantu sekali dalam menambah modal usaha masyarakat karena proses dan prosedurnya sangat mudah tanpa jaminan. Dari hasil penelitian diketahui terjadi pengembangan yang sangat tinggi dari pemanfaat UEP yaitu dari jumlah kelompok 216 dan anggota 2.252 orang pada tahun 2005 menjadi 804 kelompok dan 8.580 anggota.

Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor –faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah sosial, ekonomi dan budaya, disamping faktor internal masyarakat sendiri dan faktor eksternal diluar masyarakat. Menurut Daldjani dalam Rohmad (1994 : 29), menyatakan bahwa partisipasi akan dipengaruhi

oleh manusia, lingkungan dan kebutuhan. Partisipasi perempuan yang paling tinggi adalah pada proses perencanaan hal ini karena pada proses perencanaan melibatkan kelompok-kelompok perempuan yang secara sosial budaya sudah terbentuk dan mempunyai kegiatan rutin berupa yasinan, tahlilan, arisan, samprohan dan lainnya baik itu mingguan maupun bulanan, pada proses ini perempuan sudah banyak terlibat dalam pengambilan keputusan khususnya untuk usulan yang diusulkan dari perempuan, melihat hasil usulan yang ditetapkan dalam MKP semua desa mengusulkan kegiatan SPP dan UEP. Pada penelitian juga ditemukan faktor – faktor yang mempengaruhi selain sosial budaya yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan umlah tanggungan Keluarga.

Dari hasil penelitian partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan paling tinggi pada umur 20 – 40 tahun, sedangkan pada umur yang diatas 40 tahun partisipasi pada proses perencanaan sudah mulai menurun, hal ini disebabkan pada umur 20 – 40 tahun merupakan umur produktif dan perempuan pada umur tersebut masih aktif dalam mengikuti kegiatan – kegiatan yang diadakan di kelompok dusun atau desa, sedangkan untuk perempuan yang mempunyai umur diatas 50 tahun juga masih berpartisipasi tetapi sifatnya pasif. Partisipasi perempuan pada proses evaluasi pada umur 20 – 30 tahun paling tinggi sedangkan umur diatas 40 tahun partisipasi pada proses evaluasi masih rendah, masyarakat khususnya perempuan belum terbiasa, mereka merasa tidak mempunyai hak untuk mengevaluasi suatu program karena tugas untuk mengevaluasi adalah tugas pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang. Partisipasi pada proses

pelestarian dan manfaat kegiatan UEP yang paling banyak pada perempuan yang berumur 20-60 tahun, perempuan pada umur tersebut sebagian besar mempunyai kegiatan usaha sendiri, pengembalian dan perguliran UEP berjalan lancar, sehingga pada proses pelestarian kegiatan UEP partisipasi perempuan sangat tinggi.

Hasil penelitian pada proses perencanaan dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK yang paling tinggi adalah perempuan yang berpendidikan SMA, karena pada proses perencanaan mulai dari kegiatan musyawarah lainnya seperti MAD, Musyawarah Desa I (MD I), MKP, MD II, MD III , MD Pertanggung Jawaban dan MD Serah Terima wakil perempuan yang dihadirkan kebanyakan orang-orang terpilih yang dianggap mampu untuk diajak musyawarah, berani menyampaikan pendapat dan dapat berargumentasi, dari hasil penelitian rata-rata wakil perempuan yang ikut dalam musyarah tersebut mempunyai pendidikan SMA ke atas sehingga perempuan yang tidak diundang pada kegiatan ditingkat desa tidak akan mengikuti pertemuan atau kegiatan, tetapi pada perencanaan ditingkat kelompok maupun dusun tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi perempuan karena wadah kegiatan yang digunakan adalah kelompok yang memang sudah ada dan sudah berjalan rutin di kelompok / dusun masing-masing seperti yasinan, tahlilan, fatayat, muslimat dan lain-lain. Partisipasi pada proses pengawasan perempuan yang berpendidikan SMP dan SMA sudah mulai terlibat, sedangkan yang mempunyai pendidikan SD maupun

tidak sekolah partisipasinya masih rendah karena perempuan yang tidak bersekolah atau hanya sekolah selalu berpartisipasi pasif.

Partisipasi perempuan dalam PPK pada proses evaluasi tingkat pendidikan tidak berpengaruh yaitu rata-rata masih rendah hal ini disebabkan karena belum biasa, perempuan merasa tidak mempunyai hak untuk melakukan evaluasi dan masih berpendapat yang berhak mengevaluasi suatu program adalah pemerintah dan lembaga lain yang lebih berwenang.

Dalam kegiatan PPK pada hasil penelitian proses perencanaan sampai manfaat secara umum partisipasi perempuan yang paling tinggi adalah perempuan yang mempunyai pekerjaan (dagang dan tani), karena dalam kegiatan UEP ada persyaratan untuk bisa ikut memanfaatkan harus mempunyai usaha, sehingga perempuan yang ikut memanfaatkan semua mempunyai pekerjaan atau mempunyai usaha, kegiatan UEP dipergunakan untuk usaha ekonomi produktif., sedangkan perempuan yang murni hanya sebagai ibu rumah tangga banyak yang tidak berani meminjam disamping tidak memenuhi kriteria juga mempunyai ketakutan sendiri akan sanksi tanggung renteng, kelompok kan merasa keberatan apabila anggota yang tidak mempunyai usaha ikut pinjam UEP karena akan mempengaruhi tingkat pengembalian atau angsuran. Pada proses pelestarian dan manfaat perempuan yang mempunyai pekerjaan dagang tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibanding dengan tani karena perempuan pekerjaan dagang mempunyai penghasilan tiap hari dan umumnya mempunyai pendapatan lain (tani), sedangkan yang murni sebagai petani pembayaran angsuran dilakukan dengan

sistem musiman setiap kali panen, untuk membayar angsuran pinjaman hanya mengandalkan dari hasil panen sehingga apabila gagal panen angsuran pembayaran akan terlambat.

Hasil penelitian perempuan yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga 1-2 anak pada proses perencanaan sampai manfaat partisipasinya tinggi, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga tingkat partisipasinya semakin menurun, hal ini terjadi karena jumlah tanggungan keluarga yang sedikit mempunyai waktu yang agak longgar, anak yang diurus tidak terlalu banyak menyita waktu, kebutuhan dan tanggung jawab yang dibutuhkan juga tidak begitu berat bila dibanding dengan yang mempunyai anak banyak, sehingga pada pemanfaat yang mempunyai anak banyak dalam pembayaran angsuran pinjaman akan semakin berat karena kebutuhan yang digunakan tiap hari sudah tinggi, untuk memenuhi semua kebutuhan itu harus memerlukan kerja keras sehingga pada perempuan yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga lebih dari 4 partisipasi dalam proses perencanaan sampai evaluasi sangat rendah karena lebih mementingkan pekerjaannya sendiri agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan faktor –faktor karakteristik yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK adalah : umur, pendidikan, pekerjaan.dan jumlah tanggungan keluarga.

Menurut Lucia Dewi (2008 : 150), Partisipasi dapat berhubungan dengan 4 faktor, pertama perencanaan dari bawah atau *bottom up* dikembangkan dalam PPK secara konsisten tanpa intervensi aparat pemerintah . PPK berhasil

meminimalkan peranan aparat pemerintah dari penentu keputusan berubah menjadi pembinan, kedua muncul fenomena penguatan peranan TPK yang membuka peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaan, ketiga pemahaman yang positif dari kepala desa merupakan faktor penguat terhadap pengambil alih kegiatan PPK oleh TPK keempat munculnya peranan kelompok masyarakat sebagai saluran untuk menyampaikan rumusan kebutuhan masyarakat. PPK pada kegiatannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar musyawarah kelompok yang ditindak lanjuti pada musyawarah di tingkat Desa (MKP dan MD II), sehingga dalam penetapan usulan kegiatan perempuan mengusulkan berdasar pada permasalahan yang dihadapi dengan PPK diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi perempuan yaitu masalah ekonomi, dengan usulan kegiatan SPP maupun UEP masyarakat berharap kegiatan ini akan menjadi aset abadi dan berkelanjutan di tingkat kecamatan yang dapat digunakan untuk kelompok perempuan yang membutuhkan dengan demikian masyarakat khususnya perempuan tidak lagi kesulitan untuk meminjam modal guna meningkatkan usaha yang dimiliki tanpa persyaratan yang memberatkan.

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan kondisi geografis yang didukung oleh permasalahan masyarakat terhadap peluang usaha, pendidikan dan keterbatasan sarana, merupakan penyebab kemiskinan di kecamatan Wonosalam. PPK yang

bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan maka masyarakat diajak berdaya dengan menggunakan potensi sumberdaya yang ada, sehingga proses pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan. Menurut Margono Slamet (2003 : 175), dengan mendayagunakan dan menghasil gunakan sumberdaya lokal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga terlindunginya hak-hak dalam pengelolaan sumberdaya lokal sesuai kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembangunan akan berhasil dengan baik apabila memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada termasuk peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusianya.

Menurut Totok Mardikanto (2001 : 3-4), bahwa pengembangan masyarakat (*Community development*), secara singkat dapat diartikan sebagai upaya (yang dilakukan oleh pihak “luar “) untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar dan ketrampilan masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang-peluang untuk mengelola program-program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini PPK merupakan pihak luar yang sangat mempengaruhi terhadap keterlibatan masyarakat.

Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh PPK pada tahun 2003 sampai 2005, Penduduk Kecamatan Wonosalam sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, kondisi sosial, budaya dan ekonomi merupakan keadaan yang berhubungan dengan kehidupan sehari –hari warga masyarakat. Budaya yang

sudah ada merupakan ciri khas mereka, dengan budaya yang sudah berjalan pada warga masyarakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan program.

Pada kegiatan PPK yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian sangat diperlukan partisipasi masyarakat, karena pola PPK menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan demikian dalam PPK masyarakat diberi wewenang untuk menentukan dan mengelola kegiatan yang diusulkan. Pada proses perencanaan partisipasi masyarakat lebih tinggi dibanding dengan pada proses pelaksanaan dan proses pelestarian. Menurut Y. Slamet (1992 : 23), bahwa partisipasi pada tahap perencanaan paling tinggi tingkatannya bila diukur dari derajat keterlibatannya. Pada tahap perencanaan PPK mulai dari sosialisasi tingkat desa, sosialisasi tingkat dusun atau kelompok kemudian penggalian gagasan atau penetapan usulan kelompok partisipasi secara umum sangat tinggi hal ini karena proses perencanaan memanfaatkan kelompok-kelompok atau pertemuan - pertemuan yang sudah berjalan di masing-masing desa, hampir semua masyarakat di desa-desa se Kecamatan Wonosalam sudah mempunyai kegiatan rutin berupa tahlilan, yasinan, arisan dan kegiatan lainnya yang memang sudah menjadi budaya masyarakat perdesaan, kegiatan tersebut bermanfaat untuk menjaga tali silaturahmi antar warga dan menjadi wadah kebersamaan dalam mengadakan musyawarah untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya kelompok-kelompok tersebut menjadi wadah untuk membahas permasalahan yang dihadapinya sehingga pada kegiatan PPK khususnya pada proses perencanaan masyarakat bisa ikut terlibat dengan cara *urun rembuk*, pikiran untuk

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Begitu juga partisipasi perempuan pada proses perencanaan PPK sangat tinggi, dengan adanya PPK perempuan diberi kesempatan untuk mengusulkan kegiatan yang memang merupakan kebutuhan kaum perempuan, selain itu perempuan juga diajari untuk berani mengemukakan pendapat, dilibatkan dalam mengambil keputusan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan dalam program pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung khususnya masyarakat perempuan dari proses pengambilan keputusan sampai pada pelestarian kegiatan sangat bermanfaat sekali sehingga masyarakat akan merasa memiliki (*rasa andarbeni*) .

Dalam kehidupan sehari – hari masalah yang dihadapi masyarakat khususnya perempuan adalah masalah ekonomi, karena selama ini masyarakat miskin untuk dalam mencari pinjaman modal masih tergantung pada rentenir (orang yang meminjamkan uang) dengan bunga yang sangat tinggi, karena untuk meminjam ke Bank memerlukan persyaratan yang tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi karena harus mempunyai agunan, dengan adanya PPK masyarakat khususnya perempuan tergerak hatinya untuk mengusulkan kegiatan UEP, dengan kegiatan UEP masyarakat kecil bisa tertolong karena tidak menggunakan agunan, hanya agunan berupa kepercayaan dan *tanggung renteng* kelompok. Pada kegiatan UEP keterlibatan kelompok perempuan sangat tinggi karena hampir semua yang memanfaatkan adalah kelompok perempuan yaitu dari jumlah kelompok 804 dan jumlah anggota 8.580 Orang, dengan rincian kelompok laki-laki sebanyak 8

kelompok dengan jumlah anggota 109 orang dan kelompok perempuan sebanyak 794 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 8.471 orang. Banyaknya pinjaman sudah beredar sebesar Rp 12.694.150.000. Saldo pinjaman sebanyak Rp 6.071.650.000,- dengan rincian pinjaman kelompok perempuan sebanyak Rp. 5.946.300.000,- dan pinjaman kelompok Laki-laki Rp. 125.350.000,- dan tunggakan yang ada sebesar Rp. 87.704.800,- jumlah ini yang merupakan tunggakan dari kelompok laki-laki sebesar Rp .18.581.400,- yang selebihnya tanggakan dari kelompok perempuan, berdasarkan prosentasi tunggakan pinjaman kelompok laki-laki sebesar 15 % sedangkan tunggakan pinjaman untuk kelompok perempuan sebesar 1,2 %. Berdasarkan data tunggakan yang ada di atas menunjukkan bahwa perempuan apabila diberi kesempatan dalam suatu kegiatan program UEP hasilnya tidak kalah dengan laki-laki, bahkan tingkat pengembaliannya lebih tinggi, hal ini karena perempuan memiliki rasa “*ewuh*” = (malu) apabila tidak membayar.

Tabel 15 : Data Tunggakan Pinjaman UEP Bulan Mei 2008

Asal Kelompok	Jumlah Kelompok	Jumlah anggota	Saldo Pinjaman (Rp)	Besar Tunggakan (Rp)	Prosetasi Tunggakan
Laki-laki	8	109	125.350.000,-	18.581.400,-	14,8 %
Perempuan	796	8.471	5.946.300.000,-	69.123.400,-	1,2 %

Sumber : Laporan UPK PPK Kec. Wonosalam, Mei 2008

Dari Tabel 15 dapat diketahui tingkat pengembalian dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, pada kelompok laki-laki tingkat tunggakkanya lebih tinggi dari kelompok perempuan hal ini disebabkan peminjam laki-laki

kebanyakan digunakan bertani dan tidak mempunyai usaha sambilan sehingga apabila hasil pertaniannya gagal atau pas-pasan maka pembayaran angsuran pinjamannya akan terlambat bahkan bisa tidak terbayar, sedangkan pada kelompok perempuan tingkat pengembalianya lebih baik dari pada kelompok laki-laki hal ini karena anggota peminjam kelompok perempuan kebanyakan mempunyai usaha sendiri yaitu dagang disamping itu juga mempunyai kegiatan yang lainya (tani).

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Wonosalam khususnya Perempuan yang banyak berpartisipasi pada mulai dari proses perencanaan sampai proses pelestarian rata-rata berumur produktif yaitu umur 27 sampai 59 tahun, pada proses penggalan gagasan atau penetapan usulan tingkat dusun / kelompok perempuan yang mempunyai umur diatas 59 tahun rata-rata hanya sebagai pendengar, begitu juga untuk musyawarah di tingkat desa (MD) maupun Tingkat Kecamatan (MAD), begitu juga untuk tingkat pendidikan semakin tinggi tingkat pendidikan maka partisipasinya akan semakin tinggi ini terlihat dari hasil penelitian masyarakat perempuan yang mempunyai pendidikan SMP dan SMA keterlibatan pada kegiatan PPK semakin aktif. Sedangkan untuk pemanfaat kegiatan UEP sebagian besar masyarakat perempuan yang mempunyai kegiatan usaha (tani dan dagang) karena kegiatan ini harus kembali dan berkembang maka masyarakat yang tidak mempunyai usaha tidak berani meminjam, tetapi untuk masyarakat miskin absulud di Kecamatan Wonosalam pada akhir tahun akan dialokasikan dana dari keuntungan bersih sebesar 10 % untuk kegiatan dana sosial yang sudah berjalan tiga tahun yang

diberikan untuk kegiatan santunan yatim piatu, janda miskin dan beasiswa untuk anak kurang mampu. Sedangkan untuk jumlah tanggungan keluarga semakin kecil jumlah tanggungan keluarga maka partisipasinya akan semakin besar, hal ini karena beban yang dipikul tidak terlalu berat.

Dengan adanya PPK dapat mendorong dan memberdayakan perempuan dalam ikut serta membangun desa, serta perempuan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, ikut terlibat dalam pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Kegiatan UEP pada PPK sangat bermanfaat sekali khususnya pada perempuan karena dengan kegiatan UEP para perempuan bisa mengembangkan usaha yang sudah ditekuni dan yang belum berusaha bisa berusaha sehingga dapat membantu meringankan kebutuhan keluarga, disamping itu dengan kegiatan UEP bisa menjaga keterikatan antar anggota di kelompok maupun masyarakat pada desa lain se kecamatan Wonosalam dengan pelaku-pelaku PPK di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan. Hasil penelitian dengan adanya partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP kegiatan PPK di Kecamatan Wonosalam sampai saat ini pelestarian kegiatan berjalan bagus, dengan pengelolaan pelaku-pelaku di tingkat kecamatan UPK Kecamatan Wonosalam dalam tingkat kesehatan masuk dalam kategori sehat.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sajian data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi perempuan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak pada program-program pembangunan sebelum program PPK masih sangat rendah, karena program yang sudah ada bersifat *Top Down* ,masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pada kegiatan musyawarah perempuan tidak pernah dilibatkan.
2. Persepsi masyarakat terhadap PPK sangat berpengaruh terhadap kesediaan dan peran aktifnya dalam kegiatan PPK. Khususnya kaum perempuan dalam masyarakat menilai dan mengartikan bahwa keterlibatan dalam kegiatan PPK sesuai dengan peranan serta kebutuhan yang mereka butuhkan dan dapat dirasakan.
3. Adanya kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya perempuan, karena dengan kegiatan UEP kelompok masyarakat merasa mudah mengajukan pinjaman tanpa agunan dan tidak lagi tergantung dengan rentenir yang mematok jasa sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil usaha yang dimilikinya dan dapat menambah pendapat keluarga.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak selain faktor sosial

budaya juga faktor eksternal yaitu di luar masyarakat yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan tanggungan keluarga,

5. Dampak dari kegiatan UEP sangat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat khususnya perempuan . Pengelolaan UEP dilakukan secara terbuka (transparan). dan kelompok perempuan merasa mudah untuk mengajukan pinjaman UEP karena persyaratan tidak berbelit-belit dan tanpa agunan, seperti jasa yang ditetapkan sama dengan jasa bank pemerintah dan memperoleh IPTW. Hasil jasa yang diperoleh dari kegiatan Ekonomi dipertanggung jawabkan oleh Unit Pengelola kegiatan (UPK) melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil Desa se Kecamatan Wonosalam. Dari hasil keuntungan yang diperoleh, maka sebesar 10 % untuk kegiatan sosial yang digunakan untuk santunan yatim piatu, janda miskin dan bea siswa untuk anak yang kurang mampu, sehingga dampak dari kegiatan PPK sangat membantu untuk masyarakat miskin.
6. Pada pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian, peranan perempuan perlu dipertimbangkan, karena apabila perempuan diberi kesempatan maka hasil yang diperoleh tidak kalah dengan laki-laki.

B. IMPLIKASI

Dari hasil penelitian, ada beberapa implikasi yang perlu disampaikan kepada pihak yang terkait dalam kegiatan PPK, yaitu :

B.1. Implikasi Praktis

1. Partisipasi masyarakat pada semua program merupakan hal yang perlu diperhatikan karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka program itu tidak akan berjalan dan hasil yang diperoleh tidak akan memuaskan.
2. Pada kegiatan program sebelum PPK, musyawarah yang sering dilakukan tidak pernah melibatkan perempuan, semua pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki, sedangkan dalam PPK, setiap musyawarah selalu melibatkan semua unsur masyarakat baik laki-laki, perempuan dan warga masyarakat miskin, selain itu juga terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta terlibat dalam proses pelestarian.
3. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menumbuhkan rasa memiliki, sehingga akan timbul usaha – usaha pelestarian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada PPK mempunyai keuntungan yaitu :
 - a. Partisipasi merupakan katalisator untuk program selanjutnya
 - b. Masyarakat perempuan mengetahui penyebab kemiskinan yang selama ini dihadapi sehingga mengetahui jalan pemecahannya.
 - c. Dengan kegiatan UEP kelompok perempuan kegiatannya semakin jelas dan aktif.

- d. Dengan kegiatan UEP masyarakat perempuan tidak lagi sulit mencari pinjaman untuk menambah modal usahanya.
- e. Kegiatan UEP dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah.
- f. Dengan kegiatan UEP masyarakat miskin absolut ikut merasakan hasilnya dari keuntungan yang diperoleh tiap tahun sebesar 10 % untuk kegiatan sosial, kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan berupa santunan anak yatim piatu, Janda miskin dan Bea siswa untuk anak kurang mampu.
- g. Dengan kegiatan UEP kegiatan PPK yang walaupun sudah pasca program kegiatan PPK tetap masih berjalan, hal ini terjadi karena partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pelestarian kegiatan.

B.2. Implikasi Teoritik

1. Penelitian yang mengambil lokasi di Kecamatan Wonosalam ini lebih memfokuskan pada partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP, dengan kondisi yang sudah berjalan dimasyarakat pada program sebelum PPK partisipasi masyarakat khususnya perempuan sangat kecil, dengan adanya PPK yang mempunyai tujuan khusus diantaranya : meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pengendalian, pelestarian kegiatan dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proyek-proyek atau program-program pembangunan maupun pelaksanaannya, maka dari pada itu untuk mewujudkan partisipasi masyarakat

dibutuhkan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan, artinya dalam pelaksanaan sesuai dengan tujuan khusus PPK masyarakat perempuan selalu dilibatkan dalam semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring pembangunan.

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan selain persepsi dan sosial budaya juga dipengaruhi oleh faktor – faktor yang karakteristik mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP pada kegiatan PPK, meliputi :

- a) Umur

Partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP kebanyakan yang berpartisipasi adalah perempuan yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun, dari hasil penelitian yang aktif berpartisipasi adalah perempuan yang berumur 30 sampai 50 tahun. Masyarakat perempuan yang banyak ikut berpartisipasi adalah perempuan yang sudah menikah dan berumur diatas 20 tahun karena masyarakat perempuan yang belum menikah rata-rata masih mempunyai kegiatan sekolah dan belum banyak tergabung pada kelompok-kelompok perempuan yang sudah mempunyai kegiatan rutin di masing-masing desa, sedangkan untuk perempuan yang mempunyai umur diatas 60 tahun juga masih berpartisipasi dalam kegiatan PPK tetapi sifatnya pasif hanya sebagai pendengar tetapi tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan maupun ikut memanfaatkan kegiatan UEP karena pada umur 60 tahun keatas banyak perempuan yang sudah tidak punya kegiatan usaha sehingga tidak berani untuk meminjam dana UEP karena

takut tidak bisa membayar angsuran. Kegiatan yang diikuti hanya merupakan kegiatan-kegiatan perempuan yang memang sudah rutin diadakan pada kelompok perempuan seperti ; yasinan dan tahlilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP sangat dipengaruhi oleh umur, dimana masyarakat perempuan yang banyak terlibat adalah yang berumur produktif (20 tahun sampai 50 tahun).

b) Pendidikan

Menurut Rogers dan Schumaker dalam Rohmad (1994 : 31) menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh karakteristik sosial individu dan terpaan massa, menurutnya semakin tinggi tingkat pendidikan, pendapatan dan prestise pekerja, semakin tinggi partisipasinya. Pada hasil penelitian perempuan yang tidak bersekolah atau hanya sekolah sampai SD dan SMP dalam kegiatan PPK selalu berpartisipasi pasif , dalam menentukan usulan tidak berani menyampaikan, disini hanya banyak yang sebagai pendengar. Kegiatan yang diikuti hanya pada kegiatan ditingkat Dusun atau kelompok, hal ini karena banyak masyarakat perempuan mengikuti kegiatan kelompok yang memang sudah dilakukan secara rutin pada masing-masing desa di Kecamatan Wonosalam yang berupa kegiatan keagamaan yaitu : Yasinan, Tahlilan, arisan, Samprohan, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pada kegiatan musyawarah lainnya seperti MAD, Musyawarah Desa I (MD I), MKP, MD II, MD III , MD Pertanggung Jawaban dan MD Serah

Terima wakil perempuan yang dihadirkan kebanyakan orang-orang terpilih yang dianggap mampu untuk diajak musyawarah , dari hasil penelitian rata-rata wakil perempuan yang ikut dalam musyarah tersebut mempunyai pendidikan SMA ke atas. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang partisipasinya semakin aktif.

c) Pekerjaan

Dalam kegiatan PPK pada tahap perencanaan secara umum banyak masyarakat khususnya perempuan yang ikut terlibat, terutama pada sosialisasi tingkat kelompok dan penggalian gagasan tingkat kelompok, pada kegiatan ini semua perempuan yang ikut berpartisipasi, sedangkan dalam kegiatan UEP tidak semua perempuan ikut memanfaatkan hal ini disebabkan ada persyaratan untuk bisa ikut memanfaatkan harus mempunyai usaha, sehingga perempuan yang ikut memanfaatkan semua mempunyai pekerjaan atau mempunyai usaha, sedangkan usuha yang dimiliki beraneka ragam yaitu dagang, tani, jasa tetapi sebagian besar mempunyai usaha dagang. Karena kegiatan UEP dipergunakan untuk usaha ekonomi produktif maka tidak ada pemanfaat atau peminjam yang tidak mempunyai usaha, perempuan yang murni hanya sebagai ibu rumah tangga banyak yang tidak berani meminjam disamping tidak memenuhi kriteria juga mempunyai ketakutan sendiri akan sanksi *tanggung renteng*, kelompok kan merasa keberatan apabila anggota yang tidak mempunyai usuha ikut pinjam UEP karena akan mempengaruhi tingkat pengembalian atau angsuran.

d) Jumlah Tanggungan Keluarga

Semakin jumlah tanggungan keluarga tingkat partisipasi perempuan pada PPK semakin rendah, hal ini terjadi karena lebih mementingkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dibanding dengan yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga sedikit.

3. Pada Program Pengembangan Kecamatan proses partisipasi yang dipergunakan pada awalnya merupakan proses mobilisasi dengan ciri khas pendekatan perencanaan dari bawah sehingga partisipasi sangat nampak dalam perencanaan, tetapi setelah tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian masyarakat khususnya perempuan merasakan hasil yang sangat bermanfaat dan membantu kelangsungan kegiatan kelompok dan keuntungan pribadi dari kegiatan UEP, partisipasi dapat berjalan sendiri tanpa adanya mobilisasi.

C. REKOMENDASI

Dengan temuan – temuan hasil penelitian penulis berharap akan memberikan manfaat yang besar bagi pihak lain. Masukan sebagai rekomendasi guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan UEP antara lain :

8. Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berjenjang kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dalam kegiatan PPK khususnya UEP dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

9. Melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dikontrol oleh masyarakat.
10. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar pengelolaan dana UEP yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (PPK) yang sudah dilakukan secara transparan dapat berjalan baik.
11. Melakukan pendampingan dan pembinaan administrasi, kelembagaan kelompok secara terus menerus sehingga kegiatan UEP dapat berjalan terus.
12. Membantu masyarakat dan kelompok khususnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya tentang pelestarian UEP agar dapat meminimumkan tunggakan.
13. Tim Pelestari Desa yang sudah berjalan baik diharapkan tetap berfungsi secara optimal agar kegiatan yang sudah berjalan baik dapat berkesinambungan.
14. Dalam melakukan kebijakan dan memutuskan kebijakan diupayakan menggunakan model pendekatan yang lebih partisipatif dan *bottom up* dengan melibatkan masyarakat.
15. Peran perempuan perlu dipertimbangkan dalam setiap pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I. Indrawijaya. 2002. *Perilaku Organisasi*, Penerbit Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Arief Budiman. 1985. *Pembagian Kerja Secara SEksual*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Basrowi Sudikin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendana. Surabaya.
- Biran, Z.B. 1978. *Sebuah Catatan tentang Persepsi Sosial*, Bahan Pelengkap OPPEK. Proyek Pengembangan Beasiswa dan kegiatan Kemahasiswaan Depdikbud. Jakarta.
- Burhan Nurgiyanto, dkk, 2004. *Statistik Terapan*, Gadjah mada University Press. Yogyakarta.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research For Education : An introduction To Theory And Methods*. Boston, Mass, : Allyn and Bocon. Inc.
- Canada Internasional Developoment Agency. 1991. *Buku Pedoman Latihan Mengelola Program Pembangunan bagi Perempuan*. United Nations; Economic and Sosial Commission for Asia and The Pacific (ESCAP).
- Cleves Julia, M. 2002. *Half The World, Hald a Chance an Introduction to Gender and Development, Gender dan Pembangunan*, Rifka Anisa kerjasama Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dedy Mulyono. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Depdagri. 2002. *Petunjuk Teknis Operasional*, Program Pengembangan Kecamatan Tahun Anggaran 2002, Jakarta
- _____. 2000. *Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan*, Dirjem PMD, Jakarta.
- Drajat Tri Kartono. 2004. *Pembentukan Sistem Ketahanan Sosial*. UNS Press. Surakarta.
- Gibson, James L, Invancevich, John M and Donnely, James H. 1985. *Organisasi Perilaku, Struktur. Proses* (Edi Terjemahan oleh Djarkasih). Erlangga. Jakarta.

- Hanna, Djumhana Bastaman. 1995. *Intergrasi Psikologi dengan Islam (Menuju Psikologi Islam)*. Balai Pustaka. Yogyakarta.
- Isbandi Rukminto Adi. 1994. *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial Dasar-dasar Pemikira*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yaung,K, 1959. *Social Psikologi* : New York Appeton Sentury. Crassies.
- Yin, R. K. 1996. *Case Study Research : Design And Methods*. Beverly Hills, CA : Sage Publications.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat : Sebuah Tinjauan Administrasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Unuversitas Brawijaya. Malang, 27 Mei.
- Lucia Dewi, W. 2008. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Desa Sojomerto Kecamatan Gumuh Kabupaten Kendal*.
- Mansur Fakih. 2004. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardikanto, T.,E. Lestyari, A. Sudradjat, R. Setyowati, Supanggyo, Sutarto, S. Anantayu. 1996. *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*. Pusat Penyuluhan Kehutanan. Jakarta.
- Mar'at. 1981. *Sikap Manusia : Perubahan serta Pengukuran*. Ghalia. Jakarta.
- Margono Slamet. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. IPB Press. Bogor.
- Mekkelsen, Brita. 2003. *Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyanto Tjokrowinoto. 2003. *Pembangunan Dilema dan Tantanga*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Moleong Lexy, J. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitati*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moser, Caroline O.N. 1989. "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs." World Development. Vol.8. No.11.

- Obey, Mohamad Bin. 1998. *Persepsi Pentabir Sekolah dan Guru-Guru Terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Konseling di Sekolah-sekolah Menengah di Bahagian Kuching dan Samarahan*, Situs Internet (<http://www.Webcastmy.com.my/unimasresearchgateway/thesis/thesis 0047/bab2.htm>)
- Patton, M.Q. 1980. *Qualitatif Evaluation Methods*, Baverly Hills : C.A. Sage Publications.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender. 2004. *Hak Manusia Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rakhmat, J. 1989. *Metoda Penelitian Komunikasi*. CV Remaja Karya, Bandung.
- Razavi, Sharashoub dan Miller, Carol. 1995. *From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse*. Jenewa: UNRISD
- Robbins Stephen P. 2002. *Organizational Behavior*. Terjemahan Perilaku Organisasi (Edisi Terjemahan Tim Index) PT. Index Kelompok gramedia, Jakarta.
- Rohmad Zaini. 1994. *Identifikasi Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Perkampungan Kumuh (Slumarea) dalam Program Pembangunan di Surabaya*. Lembaga Penelitian IKIP Malang.
- Sarwono, S.W. 1997. *Psikologi Sosial: individu dan Teori-teori Sosial*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sanapiah Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* : Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Suparjan dan Hempri. S.2003. *Pengembangan Masyarakat*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press. Jakarta.
- Seitz, Virginia Rinaldo. 1995. *Women Development, and Communities for Empowerment in Appalachia*. Albany: State University Press.
- Totok Mardikanto.2003. *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Solo : Puspa.

- _____. 2001. *Dasar - Dasar Pengembangan Masyarakat*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- _____. 2001. *Prosedur Penelitian Penyuluhan Pembangunan*. Surakarta : Prima Theresia Pressindo.
- Tan, Mely G. 1995a. “ *Perempuan dan Pemberdayaan* ,” Makalah disampaikan pada Kongres/Seminar ke-2 Ikatan Sosiolog Indonesia (ISI). Di Ujung Pandang. 2-4 Nopember.
- Triwijati, Endah. 1996. “LSM Perempuan Transformatif: Gerakan Alternatif Pemberdayaan Perempuan” Dalam Mayling Oey-Gardiner, et al. *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tubbs, S.L., dan S. Moss. 1996. *Human Communication : Prinsip –prinsip Dasar* Bandung. Remaja Rosdakarya..
- Van Bemmelen, Sita. 1993. “*Gender and Development: What is New?*” *Masyarakat Indonesia* XX, no.2.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR KUESIONER

I. Petunjuk

1. Bapak / ibu / sdr dimohon mengisi dengan jawaban yang dianggap sesuai untuk pertanyaan yang berbentuk lisan.
2. Bapak / ibu / sdr dimohon memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang pada huruf a, b, dan c pada jawaban yang bapak / ibu / sdr anggap sesuai.

II. Identitas Pribadi

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Jumlah anak :

III. Variasi Partisipasi pada program lain sebelum ada Program PPK

1. Apakah bapak / ibu selalu terlibat dalam kegiatan –kegiatan pada program lain sebelum ada PPK ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
2. Pada Program sebelum PPK, apakah bapak / ibu mengikuti dalam menentukan kegiatan yang dilaksanakan ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
3. Dalam pelaksanaan kegiatan apakah bapak / ibu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2

- c. Tidak pernah, skor = 1
- 4. Dalam pelaksanaan kegiatan apakah bapak / ibu terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
- 5. Dalam pelaksanaan kegiatan apakah bapak / ibu terlibat dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
- 6. Apakah program yang sudah ada sebelum PPK, pelestarian program masih dilaksanakan ?.
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
- 7. Apakah bapak / ibu terlibat dalam pelestarian Program lain yang sudah ada sebelum PPK?.
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1

IV. Variasi Partisipasi kegiatan UEP pada Program Pengembangan Kecamatan

A. Variabel Perencanaan

- 8. Apakah bapak / ibu mengikuti proses musyawarah sosialisasi PPK, baik di tingkat Desa, kelompok maupun dusun ?.
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
- 9. Dalam mengikuti Musyawarah sosialisasi, apakah bapak / ibu selalu bertanya atau memberikan masukan atau saran ?

- a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
10. Apakah bapak / ibu mengikuti proses musyawarah penggalian gagasan baik di tingkat Dusun atau kelompok untuk menetapkan usulan kegiatan UEP yang akan diajukan pada Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan Musyawarah Desa II (MD II)?.
- a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
11. Dalam mengikuti Musyawarah penggalian gagasan kegiatan UEP, apakah bapak / ibu selalu bertanya atau memberikan masukan atau saran ?
- a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
12. Apakah bapak / ibu mengikuti MKP dan MD II untuk menetapkan kegiatan UEP?
- a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
13. Dalam mengikuti MKP / MD II, apakah bapak / ibu selalu bertanya atau memberikan masukan atau saran ?
- a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
14. Apakah bapak / ibu terlibat dalam penulisan usulan kegiatan UEP yang diusulkan dalam MKP dan MD II?.
- a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1

B. Variabel Pelaksanaan

15. Apakah bapak / ibu terlibat dalam musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan, baik sarana prasarana, SPP maupun UEP pada PPK ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
16. Apakah bapak / ibu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan, baik sarana prasarana, SPP maupun UEP pada PPK ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1

C. Variabel Pengawasan

17. Apakah bapak / ibu terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatanUEP pada PPK ?.
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1

D. Variabel Evaluasi

18. Apakah bapak / ibu terlibat dalam evaluasi hasil kegiatan UEP pada PPK?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
19. Apakah bapak / ibu mengikuti Musyawarah Pertanggung jawaban I, II dan Musyawarah Serah Terima hasil kegiatan PPK yang sudah dilaksanakan oleh TPK ?.
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
20. Dalam mengikuti MDPJ dan MDST, apakah bapak / ibu selalu bertanya atau memberikan masukan atau saran ?

- a. Sering, Skor = 3
- b. Kadang –kadang, skor = 2
- c. Tidak pernah, skor = 1

E. Variabel Pelestarian

21. Apakah bapak / ibu mengikuti kegiatan kelompok yang sudah berjalan di wilayah anda ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
22. Dalam mengembalikan / membayar angsuran SPP dan UEP, apakah kelompok bapak / ibu tepat waktu tiap bulannya?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
23. Dalam mengembalikan / membayar angsuran SPP dan UEP, apakah kelompok bapak / ibu jumlahnya sesuai angsuran tiap bulannya ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
24. Dalam proses / pelaksanaan perguliran kegiatan SPP dan UEP, apakah kelompok bapak / ibu selalu mengikuti ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1
25. Dalam pengelolaan kegiatan SPP dan UEP di Tingkat Kecamatan (UPK) apakah diadakan pembinaan ke kelompok dan ke Desa ?
 - a. Sering, Skor = 3
 - b. Kadang –kadang, skor = 2
 - c. Tidak pernah, skor = 1

F. Variabel manfaat SPP dan UEP

26. Menurut bapak / ibu bagaimana manfaat kegiatan SPP dan UEP untuk masyarakat?.
- a. Sangat bermanfaat, Skor = 3
 - b. Kadang bermanfaat, skor = 2
 - c. Tidak bermanfaat, skor = 1
27. Menurut bapak / ibu , apakah kegiatan SPP dan UEP dapat membantu meningkatkan pendapatan saudara?.
- a. Sangat membantu, Skor = 3
 - b. Membantu sedikit, skor = 2
 - c. Tidak membantu, skor = 1
28. Menurut bapak / ibu , apakah kegiatan SPP dan UEP bermanfaat untuk orang miskin ?
- a. Sangat bermanfaat, Skor = 3
 - b. Kadang bermanfaat, skor = 2
 - c. Tidak bermanfaat, skor = 1
29. Menurut bapak / ibu , apakah kegiatan SPP dan UEP bermanfaat untuk kelompok anda ?
- a. Sangat bermanfaat, Skor = 3
 - b. Kadang bermanfaat, skor = 2
 - c. Tidak bermanfaat, skor = 1
30. Menurut bapak / ibu , dengan adanya kegiatan SPP dan UEP di kelompok anda, bagaimana kondisi sekarang ?
- a. Aktif, Skor = 3
 - b. Sedang, skor = 2
 - c. Tidak aktif, skor = 1